PRODI HKI

ABSTRAK

Hibah Orang Tua Kepada Anak Pada Masyarakat Desa Taba Terunjam Ditinjau Dari Maqashid Syariah. Oleh Abdur Rahim NIM. 1516620007 Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana praktik hibah orang tua kepada anak pada masyarakat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benngkulu Tengah, (2) Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap hibah orang tua kepada anak di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benngkulu Tengah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik hibah kepada anak pada masyarakat dan memahami tinjauan Maqashid Syariah terhadap praktik hibah kepada anak pada masyarakat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benngkulu Tengah. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab persoalan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa : (1) Telah terjadi hibah orang tua kepada anak secara umum di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benngkulu Tengah. (2) Praktik hibah orang tua kepada anak pada masyarakat Desa Taba Terunjam belum sesuai konsep maqashid syariah, dikarenakan secara umum prakrik hibah yang dilaksanakan telah menghilangkan esensi hibah dan adanya kemudharatan yang terjadi setelah terjadinya hibah. Kata Kunci : Hibah, Maqashid Syariah

ABSTRAK

FITRI KURNIASARI NIM. 1611120010 Dilihat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul mengenai “ PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DAN KARYAWATI DENGAN PT. KARYA RAFLESIA MANDIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag, selaku Pembimbing I Dan Etry Mike, M.H, selaku Pembimbing II Dari data yang didapat oleh penulis, hal itu terjadi berawal dari ketidak jelasan hubungan kerja antara pengusaha dengan para buruh di PT. Karya Raflesia Mandiri dengan perjanjian kerja yang tidak jelas sekaligus tidak tertulis. Hal demikianlah yang menyebabkan antara buruh dengan pengusaha tidak seimbang. Disamping karena perjanjian yang tidak jelas menjadi pemicu awal, upah yang diberikan oleh PT. Karya Raflesia Mandiri tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Berdasarkan observasi awal, PT. Karya Raflesia Mandiri adalah PT yang bergerak di bidang produksi pengelolaan sarang walet yang beralamat di Jalan Kuala Lempuing Bengkulu dan menerima pelamar kerja sesuai dengan kriteria dari tamatan SMA/SMK sederajat hingga lulusan sarjana. Pelamar kerja yang masuk di PT Karya Raflesia Mandiri harus mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada bagian administrasi untuk membuat atm dan membeli alat kerja. Perjanjian kerja di PT. Karya Raflesia Mandiri dibuat secara lisan bahwa pelamar kerja akan di training selama 3 (tiga) bulan dengan gaji *training* yang diterima sebesar Rp.1.000.000,00 dan apabila telah melewati masa *training*, karyawan akan menerima gaji sebesar Rp.1.500.000,00.

ABSTRAK

Rama Juwanda NIM. 1516620008 Pernikahan *cobak* secara umum diasumsikan sebagai pernikahan yang terpaksa dilakukan dengan tujuan baik yaitu agar masyarakat menjauhi dan menghindari para remaja untuk berbuat zina. Namun kodisi ril di masyarakat desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko menunjukkan telah mendatangkan dampak buruk terhadap para remaja di desa tersebut diantara dampak buruk peneliti ingin mengetahui sebab akibat perkawinan *cobak* melalui penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan *Cobak* di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan Dampaknya Terhadap Keluarga”.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas maka dengan ini penulis mengangkat pokok pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dampak pelaksanaan pernikahan *cobak* terhadap keluarga di desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *cobak* di desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?

**ABSTRAK**

Reza Pebta Ariska, 2019. **Tinjauan Maslahah Mursalah tentang Penerapan Aturan Adat Pekal Berkaitan dengan Perkawinan (Studi di desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko**. Pembimbing I: Dr. H. Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II: Yovenska L. Man, M.HI

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan aturan adat perkawinan suku pekal di desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko; 2) Untuk mengetahui tinjauan Maslahah Mursaiah tentang Penerapan Aturan Adat Pekal Berkaitan dengan Perkawinan (Studi di desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: bahwa: 1) Pelaksanaan aturan adat pernikahan yang ada di desa Air Buluh ini diantaranya: a) Masuk kaum: yaitu calon mempelai laki-laki masuk kaum di desa Air Buluh tersebut. Dimana terdapat 6 kaum dan syaratnya harus memotong kambing dan menyerahkan piring satu lusin. b) Tunangan: malam tukar cincin antara laki-laki dan perempuan seperti cincin emas. c) Berasan/sepadik: adalah berunding atau berkumpul untuk membicarakan waktu pelaksanaan dengan saudara-saudara dimana keluarga menentukan apa-apa yang dipersiapkan dan hal-hal yang dianggap perlu. d) Berasan gedang, adalah berunding yang kedua untuk membicarakan hal apa yang dipersiapkan dan menentukan hari H, dengan tujuan agar kaum lainnya tahu bahwa akan ada pernikahan setelahnya. e) *Sarafal Anam*: dilakukan semalam sebelum akad. f) Akad nikah. g) Arak-arak. h) Duduk pundi makan. 2) Adapun tinjauan *maslahah mursalah* terhadap perkawinan suku Pekal yakni: dari segi masuk kaum, maslahahnya adalah memberikan pandangan bahwa dengan adanya masuk kaum menambah persaudaraan ke dalam kaum di desa Air Buluh. Selanjutnya jika terdapat permasalahan di desa Air Buluh, maka kaum akan menguruskannya hingga tuntas atau memberikan tanggung jawab kepada seseorang yang masuk kaum di desa Air Buluh, karena dengan adanya masuk kaum diketahui oleh masyarakat umum dan menjadikan anggota persaudaraan di masyarakat desa Air Buluh. Selanjutnya berasan gadang, maslahah mursalahnya adalah memberikan bantuan dan saling menolong diantara masyarakat desa pada saat ada hajat atau acara. Selanjutnya Berasan/sepadik (Berunding adik sanak) dan berasan besar (berunding besar): maslahah mursalahnya adalah bersilaturahmi pada sanak keluarga untuk mengikat tali persaudaraan. *Sarafal Anam*, masalahah mursalahnya adalah menumbuhkan kecintaan bershalawat kepada Rasulullah saw. Tahap selanjutnya adalah Akad, arak-arak. Dan dilanjutkan duduk pundi makan, adalah makan bersama dengan isteri.

ABSTRAK

Sissy Silvia Hafizah, 2020. Penggunaan Hak Ijbar Wali Terhadap Anak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Fiqh Dan HAM. Pembimbing I Masril, MH, Pembimbing II: Nenan Julir, Lc.,M.Ag Bagaimanakah hukumpenggunaan hak ijbarwali terhadap anak perempuan dalam perkawinan perspektif Fiqh dan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuihukum hak ijbar wali terhadap anak perempuan dalam perkawinan perspektif Fiqh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan model penelitian hukum deskriptif analisis.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) dalam fiqh khususnya dalam kajian para Imam Mazhab ada pendapat Imam Syafi‟i, Malikiyah, Hanbaliyah yang membenarkan adanya hak ijbar dalam perkawinan. Sedangkan menurut Imam Hanafiyah hak ijbar hanya berlaku untuk anak yang masih kecil, gila, dan idiot sedangkan jika anak perempuan tersebut sudah baligh, dewasa ia boleh memilih alon pasangannya sendiri, 2) dalam perspektif HAM, penggunaan hak ijbar dalam perkawinan dalam konsep perkawinan hak ijbar dianggap salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terkhususnya terhadap perempuan dan anak.Menurut analisis penulis dalam fiqh hak ijbar masih berlaku dan berkuatan kuat hanya saja imam Hanafiyah yang tidak mengakuinya dan hal itu sejalan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakui adanya hak ijbar, namun dalam Kompilasi Hukum Islam mengakui dan memberlakukan hak ijbar boleh dilaksanaan namun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang itu. Dalam HAM senada dengan teori relativisme budaya hak ijbar diperbolehkan selagi hal tersebut menguntungkan bagi si anak dan tidak merugikan. Sedangkan selaras dengan teori universalitas HAM jelas tidak mengakui adanya hak ijbar karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak ijbar tidak dapat berlaku apapun alasannya. Dan hal itu senada dalam hukum Islam bahwa jika hak ijbar disalahgunakan dan tidak menguntungkan si anak maka tetap saja hak ijbar tidak dapat berlaku dan dilaksanakan. Kata Kunci: Hak ijbar, Wali, Perkawinan, Fiqh dan HAM

PRODI HTN

ABSTRAK

FERI FADLI NIM. 1516150038Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum pada wanita pekerja malam menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam perspektif Hukum Islam”. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dikaraoke Devita Kota Bengkulu perspektif Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam?Apa saja yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di karaoke Devita Bengkulu?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya. Metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskreptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwaKedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum pada wanita pekerja malam menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam perspektif Hukum Islam.pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari, defita karaoke selaku perusahaan yang mempekerjakan tenaga wanita pada malam hari tersebut telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa peraturan yang sesuai, yaitu menyediakan layanan angkutan antar jemput bagi pekerja wanitayangberangkatdanpulangbekerjaantarapukul23.00sampaidengan 05.00 sesuai dengan Pasal 76 ayat (4), memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pegawai sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) , memberikan upah yang layak yaitu sesuai dengan Upah Minimum Regional sesuai dengan Pasal 90 ayat (1), dan beberapa peraturan lainnya. Akan tetapi dari segi perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Pengusaha tidak memenuhi hak pekerja wanita.

Kata kunci : pekerja, wanita,perlindungan

**ABSTRAK**

**Urgensi Optimalisasi Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aurringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.**

Oleh : FIRMAN SAPUTRA, NIM 1516150015.

Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, SH. MH. dan Pembimbing II : Wahyu Abdul Jafar, MH.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : (1) Bagaimana Urgensi Optimalisasi Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aurringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, dan, (2) Apa Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aurringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Untuk mengungkap persoalan di atas, meotode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menggali data, informasi mengenai Urgensi Optimalisasi Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aurringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan menggunakan metode *Field Risearch* yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dilapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian diuraikan di analisa, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa : (1) Urgensi Optimalisasi Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aurringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur merupakan hal yang harus dilakukan karena belum adanya transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa oleh pemerintah desa. (2) Pengawasan masyarakat terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Aurringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur belum berdampak secara signifikan bagi transparansinya Pengelolaan Dana Desa. Hal ini disebabkan masyarakat belum terlibat aktif dalam pembangunan desa, mulai dari pemetaan kebutuhan desa, perencanaan dalam pembangunan, pengelolaan Anggaran Dana Desa hingga pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

**Kata Kunci** : Urgensi, Optimalisasi, Pengawasan Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa

**ABSTRAK**

**Putusan Mahkamah Konstitusi *Ultra Petita* Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*.** Oleh: Harianto, NIM: 1516150031.

Pembimbing I:Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. dan Pembimbing II: Etry Mike, SH., MH.

Ada tiga persoalan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat *ultra petita*, (2) Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat *ultra petita*, dan (3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat *ultra petita*, untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat *ultra petita*, serta memberikan pemahaman bahwa islam memiliki pandandan mengenai *ultra petita* Mahkamah Konstitusi yang merupakan kajian hukum positif berdasarkan kaidah syar’iah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan dan penelitian kepustakaan yang mengkaji, menganalisa, serta merumuskan masalah melalui buku-buku atau dokumen. Dari hasil penelitian ini putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *ultra petita*, mahkamah konstitusi harus mempertimbangkan putusannya yaitu dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dan Para ahli hukum ada yang berpendapat bahwa memutus melebihi apa yang diminta oleh pemohoon (ultra petita) itu diperbolehkan dengan alasan bahwa hakim melakukan putusan tersebut karena demi kemaslahatan publik. Menurut siyasah yang dikaji melalui kajian *al mursalah mashlahah* diperbolehkan dengan beberapa alasan yaitu mencegah kemudhoratan, dan menciptakan keadilan.

**Kata kunci:** *ultra petita*, Mahkamah Konstitusi, kewenangan, putusan, perkara

**ABSTRAK**

**Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Hibah Aset Daerah kepada IAIN dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Gedung eks Seleksi Tilawatil Qur’an),** **oleh Mohammad Walhamdi NIM 1516150028**

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian hibah aset daerah kepada IAIN dalam perspektif siyasah syar’iyyah (studi kasus gedung eks Seleksi Tilawatil Qur’an). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja kendala Pemerintah Daerah dalam memberikan hibah aset daerah berupa gedung eks STQ kepada IAIN Bengkulu dan bagaimana kebijakan Pemprov Bengkulu dalam pemberian hibah berupa bangunan gedung eks STQ kepada IAIN yang belum terealisasi persperktif siyasah syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan empiris dan normatif, dengan alat pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kendala dalam proses pemberian hibah aset berupa gedung eks STQ kepada IAIN Bengkulu bersumber dari 2 persoalan, yaitu kendala yang berusumber dari pihak DPRD yang sampai sekarang belum menyetujui permohonan persetujuan hibah dan kendala dari Pemerintah karena hingga saat ini surat permohonan persetujuan hibah terhenti di DPRD, serta Pemerintah Daerah tidak memperbaharui surat permohonan persetujuan hibah Ke DPRD padahal pada tahun 2018 dari pihak IAIN telah kembali menyurati BPKD namun belum ada tanggapan hingga sekarang. Dan kebijakan Pemprov Bengkulu dalam pemberian hibah berupa bangunan gedung eks STQ kepada IAIN yang belum terealisasi belum sesuai dengan kajian siyasah syar’iyyah karena hal ini tidak sesuai dengan kaidah fiqhiyah bahwasanya Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah belum menghibahkan aset eks STQ kepada IAIN agar bisa dimanfaatkan dan berdampak banyak bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Bengkulu, serta berdampak pada kemaslahatan masyarakat. Sebab saat ini bangunan gedung dikawasan eks STQ sudah tidak terawat, terbengkalai begitu saja, dan juga sering terjadi tempat sarang maksiat dan hal kriminal lainnya.

**Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Hibah, Aset Daerah, Siyasah**

**ABSTRACT**

**The Authority of the Regional Government in Providing Regional Assets Grants to IAIN in the Perspective of Siyasah Syar'iyyah (Case Study of the Ex-Tilawatil Qur'an Selection Building), by Mohammad Walhamdi NIM 1516150028**

The problem examined in this thesis is how the authority of the Regional Government in granting regional asset grants to IAIN in perspective siyasah syar'iyyah (case study of the former Tilawatil Qur’an Selection building). The purpose of this study is to analyze what are the obstacles of the Regional Government in providing regional asset grants in the form of ex STQ buildings to Bengkulu IAIN and how the Bengkulu Provincial Government's policy in granting grants in the form of ex STQ buildings to IAIN has not yet been realized by the siyasah syar'iyyah perspective. The research method used in this study is the type of field research (field research) that uses an empirical and normative approach, with data collection tools through interviews and documentation. From the results of the study it was concluded that the obstacle in the process of granting assets in the form of the former STQ building to IAIN Bengkulu originated from 2 issues, namely constraints originating from the DPRD which until now have not yet approved the grant approval application and obstacles from the Government because to date the grant approval letter stopped at the DPRD, and the Regional Government did not renew the letter of request for grant approval to the DPRD even though in 2018 the IAIN had returned to write the BPKD but there had been no response until now. And the Bengkulu Provincial Government's policy in granting grants in the form of ex STQ buildings to IAIN that has not been realized is not in accordance with the study of siyasa shyar'iyyah because this is not in accordance with the fiqhiyah rules that the actions of priests to their people must be related to benefit. In this case the Regional Government has not donated the assets of the former STQ to IAIN so that they can be utilized and have a lot of impact on the progress of education in Bengkulu Province, as well as the impact on the benefit of the community. Because at this time the buildings in the former STQ area are no longer maintained, abandoned just like that, and also often happens places of immorality and other criminal matters.

**Keywords: Authority, Local Government, Grants, Regional Assets, Siyasah**

**ABSTRAK**

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Pengawasan Usaha Batu Bata di Kecamatan Sukraja Kabupaten Seluma), Oleh Silpi Dismi Yeni, NIM 1516150082.

Permasalahan yang dikaji dalam Skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Pengawasan Usaha Batu Bata di Kecamatan Sukraja Kabupaten Seluma), Adapun Tujuan dari Peelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam (Studi Pengawasan Usaha Batu Bata di Kecamatan Sukraja Kabupaten Seluma). Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis Penelitian Lapangan *(Field Research)* dengan menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif dengan Alat pengumpulan data melalui wawancara. Dari hasil Penelitian disimpulkan bahwa Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum terlaksana dengan baik dan kurang maksimal. Dikarnakan Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah belum sepenuhnya dilaksanakan. Sosialisasi memang sudah dilakukan namun belum secara maksimal karna hanya dilakukan beberapa kali saja, Perizinan juga tidak dimiliki oleh masyarakat pemilik usaha batu bata, kurangnya peran satpol PP dalam menertibkan usaha batu bata yang berakibat kerusakan lingkungan tersebut. Dan juga kurangnya penerapan sanksi dari pihak pemerintah terhadap masyarakat pemilik usaha batu bata yang melakukan pelanggaran. Sedangkan keadaan tanah bekas galian sudah semakin banyak dan rusak tanpa adanya penanggulangan. Berdasarkan Hukum Islam pengawasan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma juga belum sesuai dengan prinsip pengawasan dalam Islam karna pihak Pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan pengawasan sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam tentang Amanah dalam melakukan tugas dengan baik agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

**Kata Kunci: Implementasi, Kerusakan Lingkungan, Hukum Islam**

**ABSTRACT**

Implementation of Seluma District Regulation No. 2 of 2016 concerning Environmental Control and Management of the Perspective of Islamic Law (Study of Supervision of Business Bricks in Sukaraja District of Seluma Regency), By Silpi Dismi Yeni, NIM 1516150082.

The problem examined in this Thesis is How to Implement Local Regulations Seluma Regency Number 2 Year 2016 Regarding Environmental Management and Management Perspective of Islamic Law (Study of Supervision of Business Bricks in Sukraja District Seluma Regency), The Purpose of this Research is to find out the Implementation of Seluma District Regulation Number 2 Year 2016 Concerning Environmental Control and Management Life Perspective of Islamic Law (Study of Supervision of Business Bricks in Sukraja District, Seluma Regency). The method used in this study is the type of Field Research (Field Research) using a Qualitative Descriptive Method with data collection tools through interviews. From the results of the study it was concluded that the Implementation of the Regional Regulation of Seluma District Number 2 Year 2016 Regarding Environmental Management and Management has not been implemented properly and is not optimal. Because Supervision conducted by the government has not been fully implemented.The socialization has been carried out, but it has not been maximized because it is only done a few times. Licensing is also not owned by the community who own brick businesses, the lack of the role of the municipal police in controlling the brick business which results in environmental damage. And also the lack of application of sanctions from the government against the community brick business owners who commit violations. While the condition of the land of former excavation has increased and damaged without any response. Based on Islamic Law, supervision in Sukaraja Subdistrict, Seluma Regency is also not in accordance with the principle of supervision in Islam because the Government has not fully carried out its duties and supervision as explained in Islam about Amanah in carrying out its duties properly in order to avoid environmental damage.

**Keywords: Implementation, Environmental Damage, Islamic Law**

ABSTRAK

FERI FADLI NIM. 1516150038 Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum pada wanita pekerja malam menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam perspektif Hukum Islam”. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dikaraoke Devita Kota Bengkulu perspektif Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam?Apa saja yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di karaoke Devita Bengkulu?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya. Metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskreptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwaKedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum pada wanita pekerja malam menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam perspektif Hukum Islam.pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari, defita karaoke selaku perusahaan yang mempekerjakan tenaga wanita pada malam hari tersebut telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa peraturan yang sesuai, yaitu menyediakan layanan angkutan antar jemput bagi pekerja wanitayangberangkatdanpulangbekerjaantarapukul23.00sampaidengan 05.00 sesuai dengan Pasal 76 ayat (4), memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pegawai sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) , memberikan upah yang layak yaitu sesuai dengan Upah Minimum Regional sesuai dengan Pasal 90 ayat (1), dan beberapa peraturan lainnya. Akan tetapi dari segi perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Pengusaha tidak memenuhi hak pekerja wanita.

Kata kunci : pekerja, wanita,perlindungan

**ABSTRAK**

**Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Hibah Aset Daerah kepada IAIN dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Gedung eks Seleksi Tilawatil Qur’an),** **oleh Mohammad Walhamdi NIM 1516150028**

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian hibah aset daerah kepada IAIN dalam perspektif siyasah syar’iyyah (studi kasus gedung eks Seleksi Tilawatil Qur’an). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja kendala Pemerintah Daerah dalam memberikan hibah aset daerah berupa gedung eks STQ kepada IAIN Bengkulu dan bagaimana kebijakan Pemprov Bengkulu dalam pemberian hibah berupa bangunan gedung eks STQ kepada IAIN yang belum terealisasi persperktif siyasah syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan empiris dan normatif, dengan alat pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kendala dalam proses pemberian hibah aset berupa gedung eks STQ kepada IAIN Bengkulu bersumber dari 2 persoalan, yaitu kendala yang berusumber dari pihak DPRD yang sampai sekarang belum menyetujui permohonan persetujuan hibah dan kendala dari Pemerintah karena hingga saat ini surat permohonan persetujuan hibah terhenti di DPRD, serta Pemerintah Daerah tidak memperbaharui surat permohonan persetujuan hibah Ke DPRD padahal pada tahun 2018 dari pihak IAIN telah kembali menyurati BPKD namun belum ada tanggapan hingga sekarang. Dan kebijakan Pemprov Bengkulu dalam pemberian hibah berupa bangunan gedung eks STQ kepada IAIN yang belum terealisasi belum sesuai dengan kajian siyasah syar’iyyah karena hal ini tidak sesuai dengan kaidah fiqhiyah bahwasanya Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah belum menghibahkan aset eks STQ kepada IAIN agar bisa dimanfaatkan dan berdampak banyak bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Bengkulu, serta berdampak pada kemaslahatan masyarakat. Sebab saat ini bangunan gedung dikawasan eks STQ sudah tidak terawat, terbengkalai begitu saja, dan juga sering terjadi tempat sarang maksiat dan hal kriminal lainnya.

**Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Hibah, Aset Daerah, Siyasah**

**MUAMALAH**

**ABSTRAK**

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Yang Masih Dalam Penawaran Orang Lain (Studi Di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)**

Oleh: Alisa Pitriani NIM: 1516120045. Pembimbing I Dr.H.Khairuddin Wahid, M.Ag, dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanah yang masih dalam penawaran orang lain di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli tanah yang masih dalam penawaran orang lain di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan tekhnik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Jual beli tanah yang masih dalam penawaran orang lain di Kecamatan padang Guci Hulu kabupaten kaur dilakukan dengan cara, yaitu Pihak penjual menawarkan tanah kepada calon pembeli, selanjutnya calon pembeli akan menawar tanah tersebut, namun apabila ada calon pembeli yang menawar dengan harga yang lebih tinggi maka si penjual akan menjual tanah tersebut kepada Calon pembeli yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, walaupun di awal sudah ada calon pembeli yang menawar lebih dulu. 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli tanah yang masih dalam penawaran orang lain di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur mengandung unsur-unsur jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu menawar barang yang telah di tawar oleh orang lain. Dalam hukum Islam, jual beli yang mengandung unsur jual beli yang dilarang hukumnya adalah haram.

*Kata Kunci: jual beli, Penawaran orang lain, Hukum Islam.*

**ABSTRAK**

Perlindungan Konsumen pada Prodak Cairan Rokok Elektrik Ditinjau dari Hukum Islam, Oleh: Anggi AnggoroNIM 1516120044

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Ayat (1) dan (3) Pada Prodak cairan rokok elektrik?.2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen pada Prodak Rokok Elektrik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Ayat (1) dan (3) Pada Prodak cairan rokok elektrik. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen pada Prodak Rokok Elektrik. Peneliti menggunakan metodekajian pustaka (*library research),* Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa:1)Secara peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen sudah cukup memadai, hak dan kewajiban produsen dan konsumen sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Namun penerapannya terutama pada produk rokok elektrik masih belum sepenuhnya dilaksanakan. 2) Hak-hak konsumen seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 secara eksplisit tidak diatur dalam Islam namun dalam prinsip-prinsip jual beli atau transaksi dalam Islam yang menurut transparasi kejelasan kedua belah pihak dan sebagai mana yang dikendaki oleh maqasid syariah semua aturan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum Islam. Namun pada prakteknya tidak dijelaskan sebagaimana mestinya. Dengan demikian implementasinya pada transaksi jual beli pada produk rokok elektrik belum sesuai dengan hukum Islam.

*Kata Kunci: Perlindungan Konsumen*

**ABSTRACT**

Consumer Protection in Electric Cigarette Liquid Prodak Judging from Islamic Law, By: Anggi Anggoro

NIM 1516120044

The problems discussed in this thesis are: 1) How is the Implementation of Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection Article 4 Paragraphs (1) and (3) on the product of e-cigarettes? 2) How is the Islamic Law Review Against Consumer Protection in Electric Cigarette Prodak. The purpose of this research is to find out the Implementation of Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection Article 4 Paragraphs (1) and (3) on Prodak e-cigarettes. To find out the Overview of Islamic Law Against Consumer Protection in Electric Cigarette Prodak. Researchers use the method of library research (library research), this research is a type of qualitative research, then the data is described, analyzed and discussed to answer these problems. From the results of this study it was found that: 1) In terms of legislation related to consumer protection is sufficient, the rights and obligations of producers and consumers are clearly regulated in Law No. 8 of 1999. However, its application, especially in electric cigarette products, is still not fully implemented. 2) Consumer rights as stipulated in Law Number 8 of 1999 are explicitly not regulated in Islam but in the principles of buying and selling or transactions in Islam which according to transparency of the two parties and as required by the sharia maqasid all the rules it is in accordance with the rules of Islamic law. But in practice it is not explained properly. Thus the implementation of buying and selling transactions on electric cigarette products is not in accordance with Islamic law.

**ABSTRAK**

**Problematika Musaqah Di Desa Padang Capo Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh: Siti Nur Fitroh, NIM: 1516120014, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah, Pembimbing I: Drs.H. Suansar Khatib, S.H, M.Ag dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.HI

Ada dua persoalan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Problematika Akad Musaqah di Desa Padang Capo, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Akad Musaqah di Desa Padang Capo. Untuk mengungkap permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, maka peneliti menggunakan metode penelitian lapangan *(field research).* Data primer diperoleh secara langsung dari para pihak melalui proses wawancara dan dokumentasi dan di lengkapi dengan data sekunder. Kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil musaqah yang dilakukan oleh masyarakat desa padang capo ini perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa ada saksi yang menghadirinya. Dalam pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil musaqah telah terdapat kebohongan yang dilakukan oleh pemilik lahan. Dimana pemilik lahan tidak memberi tahu keuntungan yang diperoleh dan tidak membagi hasil keuntungan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati diawal sehingga merugikan petani penggarap dan menguntungkan bagi pemilik lahan. dan juga tidak adanya penentuan masa kerja dalam melakukan praktek bagi hasil tersebut. Menurut hukum ekonomi syariah kerjasama ini sudah sesuai hanya saja ada beberapa hal yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Kata kunci: *Musaqah*, Hukum Ekonomi Syariah

**ABSTRAK**

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Kos Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Oleh: Fenti Ratna Sari NIM: 1516120084. Pembimbing I: Drs. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Ramadhan Sitorus. M.HI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik sewa menyewa kamar kos dengan sistem penambahan biaya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhdadap sewa menyewa kamar kos dengan sistem penambahan biaya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa menyewa kamar kos dengan sistem penambahan biaya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap sewa menyewa kamar kos dengan sistem penambahan biaya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode lapangan (*field research),* Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Pada praktik sewa menyewa kamar kos di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada akad atau perjanjian awal tidak dikatakan mengenai penambahan biaya, namun dikemudian hari pihak pemilik kamar kos meminta biaya tambahan dengan berbagai macam alasan. 2) Dalam sewa menyewa menunjukkan berlangsungnya akad *ijarah* sudah sesuai dengan hukun Islam, namun dalam hal penambahan biaya sewa kamar yang diminta oleh pemilik kamar kos yang tidak ada dikesepakatan awal tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

*Kata Kunci: Sewa Menyewa, Hukum Islam*

**ABSTRACT**

Overview of Islamic Law Against the Practice of Renting Boarding Rooms in Gading Cempaka District, Bengkulu City By: Fenti Ratna Sari NIM: 1516120084. Supervisor I: Drs. H. Supardi, M.Ag and Advisor II: Dr., Ramadhan sitorus, M.HI

There are two issues examined in this thesis, namely: (1) How is the practice of renting a boarding room with an additional cost system in Gading Cempaka District, Bengkulu City. (2) How is the Review of Islamic Law on rent rented boarding rooms with an additional cost system in Gading Cempaka District, Bengkulu City. The purpose of this research is to find out the practice of renting a boarding room with an additional cost system in Gading Cempaka District, Bengkulu City. To find out the review of Islamic law on rent rented boarding rooms with a system of additional costs in the District of Gading Cempaka, Bengkulu City. Researchers use the field method (field research), this research is a type of qualitative research, then the data is described, analyzed and discussed to answer these problems. From the results of this study it was found that: 1) In the practice of renting a room in a boarding house in Gading Cempaka District, Bengkulu City, the agreement or initial agreement was not said about additional costs, but in the future the owner of the boarding room asked for additional fees for a variety of reasons. 2 In renting it shows that the ijarah contract is in accordance with Islamic law, but in the case of additional room rental fees requested by the owner of the boarding room which is not in the initial agreement is not justified in Islamic law.

*Keywords: Leasing, Islamic Law*

**A B S T R A K**

Ganda ErnaFauziah NIM : 1516120042, Judul Skripsi **“Jual Beli Krim Pemutih Wajah Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999”** : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, 2019, 91 Halaman.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana Praktik Jual Beli Krim Pemutih Wajah Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2). Bagaimana Praktik Jual Beli Krim Pemutih Wajah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam? (3). Bagaimana Praktik Jual Beli Krim Pemutih Wajah Ditinjau Dari Undang-Undang NO 8 Tahun 1999?.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui praktik jual beli krim pemutih wajah di Pasar Panorama Kota Bengkulu (2). Untuk mengetahui praktik jual beli krim pemutih wajah ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam (3). Untuk mengetahui praktik jual beli krim pemutih wajah ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

Penelitian ini bercorak jenis penelitian lapangan (Field Research), sedangkan sumber bahan primernya yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh langsung dari pihak Penjual Krim Pemutih Wajah dan Pembeli Krim Pemutih Wajah yang melakukan transaksi jual beli, di dukung oleh data sekunder yang di peroleh sumber yang sudah ada, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data primer.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertama, (1). **Praktik jual beli krim pemutih wajah di Pasar Panorama Kota Bengkulu** yaitu jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang lainnya, transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, berbagai macam krim pemutih wajah yang di jual di Pasar Panorama sehingga pembeli bisa memilih krim mana yang ia inginkan (2). **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli krim pemutih wajah** yaitu belum sesuai dengan ajaran islam cara berdagang yang baik, seperti jujur dengan isi kandungan yang terdapat di krim tersebut, melakukan transaksi jual beli yang mengandung mudhoratnya seperti terjadinya efek samping yang ditimbulkan oleh pembeli atau pengguna krim tersebut (3). **Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli krim pemutih wajah** yaitu belum memenuhi peraturan yang telah diatur oleh UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 4, 7, dan 8.

*Kata Kunci: Krim Pemutih Wajah, Hukum Ekonomi Islam, UU No 8 Tahun 1999*

**A B S T R A K**

 Ganda ErnaFauziah NIM: 1516120042, Thesis Title **"Sale and Purchase of Face Whitening Creams in the Panorama Market of Bengkulu City in Terms of Islamic Economic Law and Law No. 8 of 1999"**: Sharia Economic Law Study Program, Bengkulu IAIN, 2019, 91 Pages.

The problem in this research is (1). How is the practice of buying and selling face whitening cream at the Panorama Market in Bengkulu City? (2). How is the practice of buying and selling facial whitening cream in terms of Islamic economic law? (3). How is the practice of buying and selling facial whitening cream in terms of Law NO 8 of 1999?

The research objectives to be achieved in this study are: (1). To find out the practice of buying and selling face whitening creams in the Panorama Market of Bengkulu City (2). To find out the practice of buying and selling face whitening cream in terms of Islamic Economic Law (3). To find out the practice of buying and selling face whitening cream in terms of Law No. 8 of 1999.

This research is of the type of field research (Field Research), while the source of the primary material is data obtained directly from the source, this data is obtained directly from the seller of face whitening cream and buyers of face whitening cream conducting buying and selling transactions, supported by secondary data that is obtained existing sources, books, documents, etc. related to the title under study to complete the primary data.

The results of the study revealed that first, (1). **The practice of buying and selling facial whitening creams in the Panorama Market in Bengkulu City**, namely buying and selling as practiced by other traders, transactions are carried out directly between the seller and the buyer, various kinds of facial whitening creams sold at the Panorama Market so that the buyer can choose which cream he wants (2). **Review of Islamic Economic Law on the practice of buying and selling face whitening cream** that is not in accordance with Islamic teachings how to trade properly, such as being honest with the contents of the cream, making buying and selling transactions containing mudhoratnya such as the occurrence of side effects caused by buyers or users the cream (3). **Review of Law No. 8 of 1999 concerning the practice of buying and selling face whitening cream** that is not yet in compliance with regulations that have been regulated by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely articles 4, 7, and 8.

Keywords: Face Whitening Cream, Islamic Economic Law, Law No. 8 of 1999

**ABSTRAK**

**Jual Beli Menuggu Di Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SP 6 Agung Jaya)** Oleh: Masna Safira, NIM: 1516120005 Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc., MA dan Pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI.

Dalam penelitian ini permasalahan yang di teliti adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli menunggu di jalan di Desa SP 6 Agung Jaya. (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli menunggu di jalan di Desa SP 6 Agung Jaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli menunggu di jalan di Desa SP 6 Agung Jaya dan untuk mengetahui Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data dan mekanisme jual beli menunggu di jalan dalam hukum Islam kemudian data tersebut. diuraikan, dianalisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut dari hasil penelitian dimana objek penelitian pelaku penjual dan pembeli ditemukan bahwa dimana jual beli yang dilakukan dengan cara menunggu di simpang empat jalan menuju pasar. (1) Merupakan kegiatan jual beli di Desa SP 6 Agung jaya yang mana Masyarakat Desa SP 6 Agung Jaya mengetahui bahwa adanya jual beli menunggu di jalan ini dari orang yang menjual ayamnya dengan harga Rp. 25000 dan dijual lagi oleh pembeli dengan harga Rp. 50000 di tempat orang-orang menunggu di jalan. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwa praktik yang terjadi tidak sesuai dengan cara yang dilakukannya. karena pihak yang menunggu dengan cara menyetop-nyetop dan memeriksa isi tas yang dibawanya secara langsung. pada umunya masyarakat tidak mengetahui harga yang ada dipasaran sehingga mereka merasa dirugikan karena adanya perbedaan harga dari pihak pembeli dan banyak pesaingan dengan cara menawar harga yang sangat rendah. (2) Menurut hukum Islam terhadap praktik jual beli menunggu di jalan yang terjadi yaitu jual beli yang dilakukan dibolehkan tetapi tidak dianjurkan, karena terjadi perbedaan harga yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur pengelabuhan dan tidak adanya kejelasan informasi harga yang ditawarkan.

***Kata kunci****: Jual beli, jalan, hukum Islam*

**ABSTRACT**

**Buying and Selling Menuggu On the Road in the Perspective of Islamic Law (Case Study of SP 6 Agung Jaya)** BY: Masna Safira, NIM: 1516120005 Supervisor I: Dr. Iim Fahimah, Lc., MA and supervisor II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI.

In this study the problems examined are: (1) How the practice of buying and selling waiting on the road in SP 6 Agung Jaya Village. (2) How is the Islamic law review of buying and selling waiting on the road in SP 6 Agung Jaya Village. The purpose of this study is to find out how the practice of buying and selling waits on the road in SP 6 Agung Jaya Village and to find out the research methodology used in this study is a descriptive qualitative method, which is useful for providing information, facts, data and buying and selling mechanism waiting in the way in Islamic law then the data. described, analyzed and discussed to answer these problems from the results of research where the object of research is selling sellers and buyers found that where buying and selling is done by waiting at the intersection of four roads to the market. (1) It is a buying and selling activity in SP 6 Agung Jaya Village, where the people of SP 6 Agung Jaya Village know that there are buying and selling waiting on this road from people who sell their chickens at a price of Rp. 25000 and resold by buyers at a price of Rp. 50000 at a place where people wait on the road. However, the community does not know that the practices that occur are not in the way that they do. because the party who waits by stopping and checking the contents of the bag he carries directly. in general people do not know the prices in the market so they feel disadvantaged because of the difference in price on the part of the buyer and a lot of competition by bargaining for very low prices. (2) According to Islamic law, the practice of buying and selling waiting on the road that occurs is that buying and selling is allowed but not recommended, because there are differences in prices that are not permitted because they contain elements of harboration and there is no clear information on the price offered.

**Keywords:** *Buying and selling, roads, Islamic law*

**ABTSRAK**

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Diskon Pada Aplikasi *T-Money* Bank Bengkulu** Oleh : Nofi Nurahma Ratri, NIM: 1611120044.

Pembimbing I: Drs. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : (1) Bagaimana Pemberian Diskon Pada Transaksi menggunakan Aplikasi *T-Money* Bank Bengkulu, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Diskon Pada Aplikasi *T-Money* Bank Bengkulu. untuk mengungkap persoalan tersebut peneliti menggunakan metode teknik analaisi deduktif yaitu teknik yang menerangkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian yang khusus. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan terlebih dahulu perkembangan teknologi yang terjadi pada bidang financial teknologi seperti *T-Money* kemudian menjelaskan *T-Money* secara umum dan kemudian menjelaskan pemberian diskon Pada aplikasi *T-Money* Bank Bengkulu. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pemberian diskon pada aplikasi *T-Money* Bank Bengkulu sebesar 50% dan 20% dalam bentuk *cashback* yang diberikan pada saat *lauching* dan *event* yang direncanakan akan diadakan secara berkala. Diskon yang diberikan saat *launching* berasal dari pihak Bank Bengkulu dan Telkom, sedangkan untuk diskon *event* sepenuhnya ditanggung oleh Bank Bengkulu (2) Akad yang sesuai untuk *T-Money* adalah akad *Wadiah* *yad Dhamanah* dan pemberian diskon berupa cashback telah sesuai dengan ketentuan syariah sebab dalam akad *Wadiah* *yad Dhamanah* penyimpan dana diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada pemilik dana. Sampai saat ini belum adal dalil yang mengharamkan penggunaan *T-Money* serta dalam penggunaanya terdapat kemasalahatan bagi umat manusia.

Kata kunci : *T-Money* Bank Bengkulu, Diskon, *Wadiah* *yad Dhamanah*

ABSTRAK

Analisis Sikap Nasabah Tentang Konversi Bank Bengkulu Ke Bank Bengkulu Syariah (Studi Nasabah Bank Bengkulu KCP Pagar Dewa) Oleh Melisa Pitri, NIM 1516140212. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap kognitif, afektif dan psikomotor nasabah Bank Bengkulu KCP Pagar Dewa terhadap rencana dikonversikannya Bank Bengkulu menjadi Bank Bengkulu Syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah nasabah Bank Bengkulu KCP Pagar Dewa sebanyak 30 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Milles and Huberman yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan. Permasalahan yang ditemukan bahwa Bank Bengkulu akan melakukan konversi menjadi Bank Syariah yang tentunya akan menimbulkan respon yang beragam dari nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Berdasarkan sikap kognitif, mayoritas nasabah Bank Bengkulu KCP Pagar Dewa belum mengetahui rencana konversi Bank Bengkulu ke Bank Bengkulu Syariah karena kurangnya informasi yang mereka terima. Berdasarkan sikap afektif, nasabah mendukung konversi dilakukan namun mayoritas dari nasabah masih ragu karena ada Bank Syariah yang masih beroperasi seperti halnya Bank Konvensional. Nasabah sangat berharap setelah konversi, Bank Bengkulu benar-benar akan beroperasi sesuai dengan syariah Islam, dan memberikan pelayanan maupun fasilitas yang lebih baik lagi. Berdasarkan sikap psikomotor, mayoritas nasabah belum mengetahui akan tetap loyal atau tidak karena konversi belum dilakukan. Sedangkan yang menyatakan akan tetap loyal dengan alasan gaji, uang pensiunan dan bantuan beasiswa Provinsi dikeluarkan dari Bank bengkulu KCP Pagar Dewa. Kata kunci : Sikap, Konversi, Bank Konvensional, Bank Syariah

**ABTSRAK**

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Diskon Pada Aplikasi *T-Money* Bank Bengkulu** Oleh : Nofi Nurahma Ratri, NIM: 1611120044.

Pembimbing I: Drs. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : (1) Bagaimana Pemberian Diskon Pada Transaksi menggunakan Aplikasi *T-Money* Bank Bengkulu, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Diskon Pada Aplikasi *T-Money* Bank Bengkulu. untuk mengungkap persoalan tersebut peneliti menggunakan metode teknik analaisi deduktif yaitu teknik yang menerangkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian yang khusus. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan terlebih dahulu perkembangan teknologi yang terjadi pada bidang financial teknologi seperti *T-Money* kemudian menjelaskan *T-Money* secara umum dan kemudian menjelaskan pemberian diskon Pada aplikasi *T-Money* Bank Bengkulu. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pemberian diskon pada aplikasi *T-Money* Bank Bengkulu sebesar 50% dan 20% dalam bentuk *cashback* yang diberikan pada saat *lauching* dan *event* yang direncanakan akan diadakan secara berkala. Diskon yang diberikan saat *launching* berasal dari pihak Bank Bengkulu dan Telkom, sedangkan untuk diskon *event* sepenuhnya ditanggung oleh Bank Bengkulu (2) Akad yang sesuai untuk *T-Money* adalah akad *Wadiah* *yad Dhamanah* dan pemberian diskon berupa cashback telah sesuai dengan ketentuan syariah sebab dalam akad *Wadiah* *yad Dhamanah* penyimpan dana diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada pemilik dana. Sampai saat ini belum adal dalil yang mengharamkan penggunaan *T-Money* serta dalam penggunaanya terdapat kemasalahatan bagi umat manusia.

Kata kunci : *T-Money* Bank Bengkulu, Diskon, *Wadiah* *yad Dhamanah*

xii

**ABSTRAK**

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Kos Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Oleh: Fenti Ratna Sari NIM: 1516120084. Pembimbing I: Drs. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Ramadhan Sitorus. M.HI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik sewa menyewa kamar kos dengan sistem penambahan biaya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhdadap sewa menyewa kamar kos dengan sistem penambahan biaya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa menyewa kamar kos dengan sistem penambahan biaya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap sewa menyewa kamar kos dengan sistem penambahan biaya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode lapangan (*field research),* Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Pada praktik sewa menyewa kamar kos di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada akad atau perjanjian awal tidak dikatakan mengenai penambahan biaya, namun dikemudian hari pihak pemilik kamar kos meminta biaya tambahan dengan berbagai macam alasan. 2) Dalam sewa menyewa menunjukkan berlangsungnya akad *ijarah* sudah sesuai dengan hukun Islam, namun dalam hal penambahan biaya sewa kamar yang diminta oleh pemilik kamar kos yang tidak ada dikesepakatan awal tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

*Kata Kunci: Sewa Menyewa, Hukum Islam*

ABSTRAK

Perlindungan Konsumen pada Prodak Cairan Rokok Elektrik Ditinjau dari Hukum Islam, Oleh: Anggi AnggoroNIM 1516120044 Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Ayat (1) dan (3) Pada Prodak cairan rokok elektrik?.2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen pada Prodak Rokok Elektrik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Ayat (1) dan (3) Pada Prodak cairan rokok elektrik. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen pada Prodak Rokok Elektrik. Peneliti menggunakan metodekajian pustaka (library research), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa:1)Secara peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen sudah cukup memadai, hak dan kewajiban produsen dan konsumen sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Namun penerapannya terutama pada produk rokok elektrik masih belum sepenuhnya dilaksanakan. 2) Hak-hak konsumen seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 secara eksplisit tidak diatur dalam Islam namun dalam prinsipprinsip jual beli atau transaksi dalam Islam yang menurut transparasi kejelasan kedua belah pihak dan sebagai mana yang dikendaki oleh maqasid syariah semua aturan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum Islam. Namun pada prakteknya tidak dijelaskan sebagaimana mestinya. Dengan demikian implementasinya pada transaksi jual beli pada produk rokok elektrik belum sesuai dengan hukum Islam. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Yang Masih Dalam Penawaran Orang Lain (Studi Di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur) Oleh: Alisa Pitriani NIM: 1516120045. Pembimbing I Dr.H.Khairuddin Wahid, M.Ag, dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanah yang masih dalam penawaran orang lain di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli tanah yang masih dalam penawaran orang lain di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan tekhnik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Jual beli tanah yang masih dalam penawaran orang lain di Kecamatan padang Guci Hulu kabupaten kaur dilakukan dengan cara, yaitu Pihak penjual menawarkan tanah kepada calon pembeli, selanjutnya calon pembeli akan menawar tanah tersebut, namun apabila ada calon pembeli yang menawar dengan harga yang lebih tinggi maka si penjual akan menjual tanah tersebut kepada Calon pembeli yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, walaupun di awal sudah ada calon pembeli yang menawar lebih dulu. 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli tanah yang masih dalam penawaran orang lain di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur mengandung unsur-unsur jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu menawar barang yang telah di tawar oleh orang lain. Dalam hukum Islam, jual beli yang mengandung unsur jual beli yang dilarang hukumnya adalah haram. Kata Kunci: jual beli, Penawaran orang lain, Hukum Islam

ABSTRAK

Sissy Silvia Hafizah, 2020. Penggunaan Hak Ijbar Wali Terhadap Anak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Fiqh Dan HAM. Pembimbing I Masril, MH, Pembimbing II: Nenan Julir, Lc.,M.Ag Bagaimanakah hukumpenggunaan hak ijbarwali terhadap anak perempuan dalam perkawinan perspektif Fiqh dan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuihukum hak ijbar wali terhadap anak perempuan dalam perkawinan perspektif Fiqh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan model penelitian hukum deskriptif analisis.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) dalam fiqh khususnya dalam kajian para Imam Mazhab ada pendapat Imam Syafi‟i, Malikiyah, Hanbaliyah yang membenarkan adanya hak ijbar dalam perkawinan. Sedangkan menurut Imam Hanafiyah hak ijbar hanya berlaku untuk anak yang masih kecil, gila, dan idiot sedangkan jika anak perempuan tersebut sudah baligh, dewasa ia boleh memilih alon pasangannya sendiri, 2) dalam perspektif HAM, penggunaan hak ijbar dalam perkawinan dalam konsep perkawinan hak ijbar dianggap salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terkhususnya terhadap perempuan dan anak.Menurut analisis penulis dalam fiqh hak ijbar masih berlaku dan berkuatan kuat hanya saja imam Hanafiyah yang tidak mengakuinya dan hal itu sejalan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakui adanya hak ijbar, namun dalam Kompilasi Hukum Islam mengakui dan memberlakukan hak ijbar boleh dilaksanaan namun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang itu. Dalam HAM senada dengan teori relativisme budaya hak ijbar diperbolehkan selagi hal tersebut menguntungkan bagi si anak dan tidak merugikan. Sedangkan selaras dengan teori universalitas HAM jelas tidak mengakui adanya hak ijbar karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak ijbar tidak dapat berlaku apapun alasannya. Dan hal itu senada dalam hukum Islam bahwa jika hak ijbar disalahgunakan dan tidak menguntungkan si anak maka tetap saja hak ijbar tidak dapat berlaku dan dilaksanakan. Kata Kunci: Hak ijbar, Wali, Perkawinan, Fiqh dan HAM.

**A B S T R A K**

Ganda ErnaFauziah NIM : 1516120042, Judul Skripsi **“Jual Beli Krim Pemutih Wajah Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999”** : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, 2019, 91 Halaman.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana Praktik Jual Beli Krim Pemutih Wajah Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2). Bagaimana Praktik Jual Beli Krim Pemutih Wajah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam? (3). Bagaimana Praktik Jual Beli Krim Pemutih Wajah Ditinjau Dari Undang-Undang NO 8 Tahun 1999?.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui praktik jual beli krim pemutih wajah di Pasar Panorama Kota Bengkulu (2). Untuk mengetahui praktik jual beli krim pemutih wajah ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam (3). Untuk mengetahui praktik jual beli krim pemutih wajah ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

Penelitian ini bercorak jenis penelitian lapangan (Field Research), sedangkan sumber bahan primernya yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh langsung dari pihak Penjual Krim Pemutih Wajah dan Pembeli Krim Pemutih Wajah yang melakukan transaksi jual beli, di dukung oleh data sekunder yang di peroleh sumber yang sudah ada, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data primer.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertama, (1). **Praktik jual beli krim pemutih wajah di Pasar Panorama Kota Bengkulu** yaitu jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang lainnya, transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, berbagai macam krim pemutih wajah yang di jual di Pasar Panorama sehingga pembeli bisa memilih krim mana yang ia inginkan (2). **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli krim pemutih wajah** yaitu belum sesuai dengan ajaran islam cara berdagang yang baik, seperti jujur dengan isi kandungan yang terdapat di krim tersebut, melakukan transaksi jual beli yang mengandung mudhoratnya seperti terjadinya efek samping yang ditimbulkan oleh pembeli atau pengguna krim tersebut (3). **Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli krim pemutih wajah** yaitu belum memenuhi peraturan yang telah diatur oleh UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 4, 7, dan 8.

*Kata Kunci: Krim Pemutih Wajah, Hukum Ekonomi Islam, UU No 8 Tahun 1999*

**ABSTRAK**

**Jual Beli Menuggu Di Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus SP 6 Agung Jaya)** Oleh: Masna Safira, NIM: 1516120005 Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc., MA dan Pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI.

Dalam penelitian ini permasalahan yang di teliti adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli menunggu di jalan di Desa SP 6 Agung Jaya. (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli menunggu di jalan di Desa SP 6 Agung Jaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli menunggu di jalan di Desa SP 6 Agung Jaya dan untuk mengetahui Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data dan mekanisme jual beli menunggu di jalan dalam hukum Islam kemudian data tersebut. diuraikan, dianalisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut dari hasil penelitian dimana objek penelitian pelaku penjual dan pembeli ditemukan bahwa dimana jual beli yang dilakukan dengan cara menunggu di simpang empat jalan menuju pasar. (1) Merupakan kegiatan jual beli di Desa SP 6 Agung jaya yang mana Masyarakat Desa SP 6 Agung Jaya mengetahui bahwa adanya jual beli menunggu di jalan ini dari orang yang menjual ayamnya dengan harga Rp. 25000 dan dijual lagi oleh pembeli dengan harga Rp. 50000 di tempat orang-orang menunggu di jalan. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwa praktik yang terjadi tidak sesuai dengan cara yang dilakukannya. karena pihak yang menunggu dengan cara menyetop-nyetop dan memeriksa isi tas yang dibawanya secara langsung. pada umunya masyarakat tidak mengetahui harga yang ada dipasaran sehingga mereka merasa dirugikan karena adanya perbedaan harga dari pihak pembeli dan banyak pesaingan dengan cara menawar harga yang sangat rendah. (2) Menurut hukum Islam terhadap praktik jual beli menunggu di jalan yang terjadi yaitu jual beli yang dilakukan dibolehkan tetapi tidak dianjurkan, karena terjadi perbedaan harga yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur pengelabuhan dan tidak adanya kejelasan informasi harga yang ditawarkan.

***Kata kunci****: Jual beli, jalan, hukum Islam*

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Ultra Petita Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Oleh: Harianto, NIM: 1516150031. Pembimbing I:Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. dan Pembimbing II: Etry Mike, SH., MH. Ada tiga persoalan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat ultra petita, (2) Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat ultra petita, dan (3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat ultra petita, untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat ultra petita, serta memberikan pemahaman bahwa islam memiliki pandandan mengenai ultra petita Mahkamah Konstitusi yang merupakan kajian hukum positif berdasarkan kaidah syar’iah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan dan penelitian kepustakaan yang mengkaji, menganalisa, serta merumuskan masalah melalui buku-buku atau dokumen. Dari hasil penelitian ini putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ultra petita, mahkamah konstitusi harus mempertimbangkan putusannya yaitu dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dan Para ahli hukum ada yang berpendapat bahwa memutus melebihi apa yang diminta oleh pemohoon (ultra petita) itu diperbolehkan dengan alasan bahwa hakim melakukan putusan tersebut karena demi kemaslahatan publik. Menurut siyasah yang dikaji melalui kajian al mursalah mashlahah diperbolehkan dengan beberapa alasan yaitu mencegah kemudhoratan, dan menciptakan keadilan. Kata kunci: ultra petita, Mahkamah Konstitusi, kewenangan, putusan, perkara

ABSTRAK

Hibah Orang Tua Kepada Anak Pada Masyarakat Desa Taba Terunjam Ditinjau Dari Maqashid Syariah. Oleh Abdur Rahim NIM. 1516620007 Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana praktik hibah orang tua kepada anak pada masyarakat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benngkulu Tengah, (2) Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap hibah orang tua kepada anak di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benngkulu Tengah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik hibah kepada anak pada masyarakat dan memahami tinjauan Maqashid Syariah terhadap praktik hibah kepada anak pada masyarakat Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benngkulu Tengah. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab persoalan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa : (1) Telah terjadi hibah orang tua kepada anak secara umum di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benngkulu Tengah. (2) Praktik hibah orang tua kepada anak pada masyarakat Desa Taba Terunjam belum sesuai konsep maqashid syariah, dikarenakan secara umum prakrik hibah yang dilaksanakan telah menghilangkan esensi hibah dan adanya kemudharatan yang terjadi setelah terjadinya hibah. Kata Kunci : Hibah, Maqashid Syariah

ABSTRAK

People Power (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Oleh: Vera Mashinta Nim: 1611150099, Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin Wahid,.M.Ag dan Pembimbing II: Yovenska L., Man, M.H.I Penelitian hukum normatif dengan judul “People Power (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dilakukan untuk memecahkan permasalahan mengenai bagaimana tinjauan hukum positif terhadap gerakan People Power dan bagaimana People Power berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan memaparkan secara jelas dan terstruktur mengenai bagaimana landasan serta pengaturan hukum mengenai tindakan People Power di Indonesia terkhususnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kedudukan hukum tindakan People Power dalam hukum positif serta di dalam hukum Islam. Setelah dilakukan penelitian bahwa tindakan People Power merupakan istilah yang masih abstrak dan ambigu hingga masih perlu di tafsirkan dan di analisis guna mendapatkan makna sebenarnya. Di Indonesia People Power dapat dihubungkan kepada dua perbuatan yang pertama People Power dihubungkan dengan perbuatan Makar, kedua People Power dihubungkan dengan Demonstrasi. People Power dihubungkan dengan Makar merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 Tentang Perbuatan Makar sedangkan People Power dihubungkan dengan Demonstrasi merupakan perbuatan yang dibolehkan dan salah satu bentuk penegakan HAM di Indonesia hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 28 E Angka (3) UUD 1945, lebih lanjut di atur di dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Sedangkan di dalam hukum Islam mayoritas ulama sepakat bahwa tindakan People Power merupakan perbuatan terlarang untuk dilakukan. Kata Kunci: People Power, Hukum Positif, Hukum Islam

ABSTRAK

 Konsumsi Rokok Pada Anak di Bawah Umur di Tinjau dari Konsumsi Islam (Studi di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah). Oleh: Sumanti.Nim: 1516130042 Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan konsumsi Islam terhadap anak di bawah umur dalam mengkonsumsi rokok di desa Renah Semanek kecamatan Karang Tinggi kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa konsumsi rokok pada anak dibawah umur di desa Renah Semanek kecamatan Karang Tinggi kabupaten bengkulu Tengah, dilakukan setiap hari, anak-anak meperoleh uang dengan cara bermacam-macam salah satunya dengan cara membohongi orang tuanya dengan alasan membeli peralatan sekolah, jenis rokok yang di konsumsi juga beragam dari rokok yang biasa-biasa saja sampai rokok yang harganya mahal, alasan mereka mengkonsumsi rokok rata-rata diajak teman-temanya, dari lima belas orang pengkonsumsi rokok mereka mengatakan bahwa rokok tersebut tidak ada manfaatnya dan mereka juga mengetahui bahaya dari rokok. Tinjauan konsumsi Islam terhadap konsumsi rokok pada anak dibawah umur di desa Renah Semanek kabupaten Benteng tidak sesuai dengan konsumsi Islam. Kata Kunci: Konsumsi Islam, Rokok, Anak di Bawah Umur.

ABSTRAK Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu) Oleh: Nama: Rieici Oktapia Rani NIM: 1611120049. Pembimbing I: Drs. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Dr.Iwan Rohmadhan Sitorus, M. HI Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini: 1. Bagaimana praktik jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Bagaimana Perpektif hukum Islam terhadap praktek jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan Metode penelitian lapangan (field research), pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriftif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme Jual Beli Jagung Bisi Sistem Tebasan Dengan Panjar Dalam Perspektif Hukum Islamn (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu). Serta Penentuan informan penelitian mengunakan teknik purposive sampling, jumlah keseluruhan adalah 18 orang. Kemudian data tersebur diuraikan, dianalisis, dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan 1.Masyarakat pada umumnya melakukan transaksi jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar yang merupakan transaksi yang terjadi karena faktor keadaan, dan kebutuhan mendesak yaitu akad yang terjadi pada saat barang masih dilahan dengan mengunakan akad khiyar. Sistem pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan panjar yang dilakukan diawal lalu melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam jual beli ini digunakan cara, bahwa pembeli memanjar uang yang ditentukan 30% dari jumlah keseluruhan, transaksi ini akadnya suka sama-sama suka tanpa adanya sifat pemaksaan antar kedua belah pihak 2. Menurut Perspektif hukum islam Jual beli Jagung Bisi Sistem Tebasan dengan Panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dibolehkan karena pada prinsipnya jual beli adalah perjanjian. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh dirubah sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya. Dan dalam kasus ini adanya wansprestasi dari pihak pembeli sehingga tidak boleh ia membatalkan pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang muka (panjar) yang suda perna dia berikan kepada penjual. Kata Kunci: Panjar dalam Jual Beli sistem Tebasan, Masyarakat Kecamatan Air Nipis, Hukum Islam.

ABSTRAK Implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembanguan Untuk Kepentingan Umum Dalam Persepektif Siyasah (Studi Di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur) Oleh Apriansyah, NIM 1516150017. Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, SH. MH dan Pembimbing II : Wahyu Abdul Jafar, M. H. I Tujuan Penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Tanah Perkebunan untuk Pembangunan Jalan di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. 2). Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Dalam Perspektif Siyasah Tentang Pembebasan Tanah Perkebunan untuk Pembangunan Jalan di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Pendekatan ini merupakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 1). Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Tanah Perkebunan untuk Pembangunan Jalan di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (2) Huruf (c) Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 ialah pengadaan tanah untuk Pembangunan jalan belum sesuai dengan ketentuan perundan-undangan yang sudah berlaku seharusnya selain musyawarah tentang bentuk pemberian ganti rugi, tim pelaksana pengadaan tanah juga harus melakukan musyawarah tentang nominal dari pemberian ganti rugi tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis hal tersebut tidak dilakukan. Kendala yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah masyarakat tidak semua dapat menerima terhadap nilai harga yang telah ditetapkan oleh lembaga penilai (appraisal), dan perbedaan pendapat mengenai makna musyawarah, dari pihak pemilik tanah dengan Badan Pertanahan Nasional. 2). Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Tanah Perkebunan untuk Pembangunan Jalan di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur di tinjau dari perspektif siyasah, pembebasan tanah perkebunan di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur yang dilakukan pemerintah setempat terdapat banyaknya unsur penipuan kepada masyarakat serta merugikan pemegang hak milik atas tanah tersebut, mengingat diatas tanah tersebut banyak sekali tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai penghasilan masyarakat setempat. Seharusnya pemerintah lebih bersikap adil dan transparan serta kebijakan yang dikeluarkan harus lebih berpihak kepada rakyat sehingga tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian menurut penulis berdasarkan kajian diatas pembebasan tanah yang dilakukan pemerintah tidak sah. Kata Kunci : Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah, Perspektif Siyasah

ABSTRAK Studi Tentang Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma) Oleh: DENNI HADI SUTRISNO, NIM: 1416111768. Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc., MA dan Pembimbing II: Yovenska, L.Man, H.I. Dalam pelaksanaan kewarisan ternyata masih terdapat adanya ketentuan hukumnya yang masih belum seragam. Ketentuan hukum mengenai pembagian kewarisan tersebar ke dalam beberapa peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keadaan yang demikian tentu menimbulkan permasalahan diantaranya mengenai akibat hukum dari pembagian kewarisan. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah “Studi Tentang Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (Di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma)”. Dalam penelitian ini akan membahas Bagaimana Praktek Kewarisan Patrilineal Di Masyarakat Kelurahan Sembayat (di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma) Bagaimana Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kewarisan Patrilineal Di Sembayat (di Kecamatan Seluma timur Kabupaten Seluma). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Hak Waris Menurut Hukum Adat kecamatan sembayat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundangundangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya. Metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskreptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembagian kewarisan di kelurahan Sembayat dilaksanakan secara kekeluargaan yang mana secara turun temurun dari laki laki yang berkuasa atas harta yang ditinggalkan. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan telah lama menjadi adat setempat membuat hukum kewarisan islam sulit diterapkan pada keluarga muslim di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Kata Kunci: kewarisan, Adat, Patrilinial

ABSTRAK Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu oleh Rizka Ayu Fitri, Nim 1516140287 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembanagan produk tabungan GeMeSS, produk tabungan Ukhuwah dan produk pembiayaan serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani kota Bengkulu. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam peneliti ini bejumlah 3 orang, yaitu Manager, Custumer Service dan Teller. Hasil penelitian dapat dikesimpulkan (1) perkembangan produk tabungan GeMeSS menujukkan cukup berkembang, karena dilihat dari jumlah nasabahnya dari 20 bulan 14 bulan yang mengalami perkembangan dan dilihar dari pendapatannya itu 12 bulan yang mengalami perkembangan. (2) perkembangan produk tabungan Ukhuwah menujukkan perkembangan yang sempurna, karena dilihat dari jumlah nasabah dan pendapatan setiap bulan mengalami perkembangan. (3) perkembangan produk pembiayaan menujukkan perkembangan cukup sempurna, karena dilihat jumlah nasabah setiap bulan meningkat dan dilihat pendapatannya dari 20 bulan 11 bulan yang mengalami perkembangan. (4) faktor pendukung dan penghambat perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ukhuwah bintang ihsani kota Bengkulu (a) faktor pendukung adalah pelayanan, jenis tabungan tidak ada administrasi, tidak ada potongan perbulan dan kerjasama dengan yayasan-yayasan. (b) faktor penghambat adalah keterbatasan modal, tidak mempunyai ATM, tidak ada pelatihan karyawan dan sumber daya manusia (SDM) masih belum banyak mengetahui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Kata Kunci : Perkembangan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

ABSTRAK Pemahaman Investor Galeri Investasi Syariah BEI IAIN Bengkulu Tentang Syariah Online Trading System (SOTS) Oleh : Putri Yansi NIM 1416142343 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman Investor galeri investasi syariah BEI IAIN Bengkulu tentang syariah online trading system (SOTS). (2) untuk megetahu metode galeriinvestasisyariah dalam menyampaikanpemahaman tentang shariah online trading systemkepada investor.penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitudata primer dan data sekunder. Adapun sumber data berupaobservasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) tingkat pemahaman investor galeri investasi syariah dari 15 informan sebanyak 8 orang investor berada pada tingkatan pemahaman menterjemahkan (Translation)dimana investor memahami tentang syariah online trading system (SOTS) itu ialah sebuah aplikasi transaksi saham syariah secara umumnya saja dengan jawaban yang berbeda-beda namun dengan maksud yang sama tetapi investor tidak mampu memberikan penjelasanya, kurangnya rasa ingin tahu dan menganggap hal tersebut belum terlalu penting. (2) metode yang digunakan oleh pihak galeri investasi syariah dalam memberikan pemahaman tentang syariah online trading system(SOTS) kepada investor yaitu dengan mengunakan metode sosialisasi, edukasi, dan diskusi. Dari ketiga mentode tersebut investor hanya memahami metode yang diberikan oleh pihak galeri investasi syariah dengan metode sosialisasi secara face toface atau secara tatap muka langsung saja. investor kurang memahami syariah online trading system (SOTS) disebabkan tidak menegtahui informasi mengenai metode diskusi dan edukasi yang diberikan dan kurangnya rasa ingin tahu dari investor. Berinvestasi di saham syariah dapat dilihat dari kajian ekonomi islam yaitu Investasi adalah salah satu cara untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif.Pihak-pihak yang betransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi adanya kerelaan dari para pihak yang terlinat dalam transaksi tersebut. Kata Kunci: Pemahaman, Investor, syariah online trading sysytem (SOTS)

ABSTRAK Zili Salati Ulfah, 2019. Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Pada Bank Konvensional Ditinjau Dari Hukum Islam. Pembimbing I Dr. Imam Mahdi, SH., MH. dan Pembimbing II Dr. Iim Fahima, Lc.,MA. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui: 1) kedudukan pembuatan akta otentik oleh notaris pada Bank Konvensional. 2) mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pembuatan akta otentik oleh notaris pada Bank Konvensional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Kedudukan Notaris dalam pembuatan akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang bersifat otentik, oleh karena itu Notaris dalam membuat akta harus hati-hati dan selalu berdasar pada peraturan. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pembuatan akta otentik oleh Notaris menurut hukum Islam kedudukan notaris menyangkut ke dalam kaidah-kaidah hukum Islam yang universal dalam praktik bisnis syariah secara khusus dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) hal, yaitu: pertama, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan bisnis (muamalah) yaitu obyek perdagangan atau perniagaan harus halal dan thayyib menurut asas sukarela („antaradhin) dan pengelolaan yang berdasarkan saling percaya (amanah). Konsep obyek halal lebih menekankan adanya unsur halal dan bukan berbisnis yang diharamkan oleh Islam seperti menjual minuman keras, najis, alat-perjudian dan lainlain. Disandarkan berdasarkan norma hukum Islam bukan sekedar memenuhi hasrat keutungan semata. Tinjauan hukum Islam terhadaap peran Notaris Rudi Indrajaya, S.H.,S.IP.,Sp.N dalam pembuatan akta otentik pada bank Konvensional yang dipraktekkan di Kantor Notaris telah sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Alquran dan UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) yaitu sebagai pejabat yang mencatat dan membukukan suatu perjanjian atau akad yang sifatnya tertulis dan menjadi saksi bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, antara lain sebagai berikut : a) Notaris/PPAT harus melakukan wewenangnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam UUJN; b) Tidak melakukan penipuan atau manipulasi data yang terjadi di lapangan dengan yang tertulis sehingga akan merugikan kedua belah pihak. Kata Kunci: Akta Otentik, Notaris, Bank Konvensional

ABSTRAK Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/Pa.Bn) Oleh: ARIA GANDI, NIM: 1516110040. Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. dan Pembimbing II: Nenan Julir, Lc., M. Ag. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim menolak gugatan nafkah lampau anak dalam putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim menolak gugatan nafkah lampau anak dalam Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penolakan terhadap gugatan nafkah lampau anak. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelusuri berbagai literatur yang relavan dengan pokok pembahasan, seperti dokumen-dokumen, catatan, maupun laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun dalam teknik analisa data penyusun menggunakan metode deskriptif-deduktif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn yaitu “Bahwa kewajiban tergugat sebagai ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ bukan lil tamlik, maka kelalaian tergugat tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah/lampau untuk anak) tidak bisa digugat.” Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003. (2) Menurut tinjauan hukum Islam nafkah lampau anak dalam putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn tidak gugur dengan lewat masanya ketika ditentukan oleh hakim menurut pendapat Madzhab Syafi’i dan Maliki. Kata Kunci: Putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn, Nafkah Lampau Anak, Yurisprudensi, Hukum Islam.

ABSTRAK Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah Oleh Deti Hespika NIM :1516150041 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara desriptif. Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menemukan bahwa : pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan dialihkan pada pemerintah daerah provinsi, dan Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti telah Memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pentingnya pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan karena adanya kerusakan hutan yang terjadi akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti pembukaan lahan baru untuk dijadikan perkebunan dengan cara membakar hutan terlebih dahulu, dengan hal ini akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor saat hujan, dimana manfaat hutan lindung seharusnya untuk penyedia bahan baku, pelestari tanah, penyedia sumber air, dan sangat berperan penting sebagai penyeimbang lingkungan. Menyikapi Fakta-fakta diatas maka Peran Pemerintah dalam hal ini harus lebih aktif dalam mengupayakan peraturan, sosialisasi dan masyarakat harus menjaga Kelestarian Hutan lindung dan menjaga ekosistem hutan agar tidak terjadinya kerusakan, terutama kerusakan di wilayah Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana dalam hal ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya namun kesadaran masyarakat yang belum ada untuk tidak memanfaatkan hutan lindung sebagai hutan produksi atau menjadikan perkebunan pribadi tanpa izin dari pemerintah setempat. Kata Kunci : Pengawasan, Perlindungan Hutan, Hutan Lindung.

ABSTRAK Pemahaman Masyarakat Mengenai Karakteristik Nilai Konsumsi Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus di Perumahan Adzaky Selebar Bengkulu) oleh Nur Khasanah, NIM 1516130017. Dalam Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena manusia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat Perumahan Adzaky Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu mengenai karakteristik nilai konsumsi dalam ekonomi Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan teknik pengumpulan data. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang masyarakat dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Dari hasil penelitian ini ditemukan sebanyak 15 orang yang belum mengetahui sama sekali tentang berkonsumsi secaara ekonomi Islam, sedangkan 5 orang lainnya mereka ada yang tahu namun masih melanggar aturan yang ada. Kata Kunci: Karakteristik Nilai Konsumsi

ABSTRAK Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (Studi di BRI Syariah Kota Bengkulu) Oleh Novita Al Ulandari, NIM 1516140063 Pada Penelitian ini terdapat dua tujuan: (1) Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah di Kota Bengkulu. (2) Untuk mengetahui proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perbankan Syariah di Kota Bengkulu secara general sudah melakukan perannya, upaya yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan benar atau tidaknya produk salam perbankan tersebuat sesuai dengan prinsip syariah. (2) Proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di Kota Bengkulu memiliki beberapa tahapan, calon DPS harus memiliki sertifikasi DPS, kemudian bank tersebut mengajukan calon DPS kepada OJK, selanjutnya pihak OJK melakukan proses wawancara kepada calon DPS, jika calon DPS tersebut memenuhi kompetensi yang sesuai dengan klasifikasi maka calon DPS tersebut diangkat menjadi DPS oleh pihak bank. Kata Kunci : Peran Dewan Pengawas Syariah.

ABSTRAK Implementasi Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu. Oleh: Dini Trissiani, NIM: 161120013. Pembimbing I: Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Implementasi Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu, (2) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik pelaksanaan hotel syariah pada Hotel Latansa Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Hotel Latansa belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, ketentuan yang belum terlaksana yaitu: Hotel Latansa belum memiliki sertifikat halal dari MUI, Hotel Latansa masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan Pelayanan. Adapun pokok-pokok ketentuan Fatwa yang telah dilaksanakan Hotel Latansa, yaitu: Larangan dilarang Check in bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan scenning proces kepada tamu hotel, Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, tidak menyediakan Fasilitas Hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti cafe, karoeke, kolam berenang, dan sarana terapis, sudah menerapkan dan menggunakan akad Ijarah dengan tamu hotel. (2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Hotel Syariah adalah boleh (mubah) karena keberadaan hotel syariah dapat mendatangkan kemanfaatan, selama aktifitas hotel menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu Bahaya. Kata Kunci : Implementasi, Fatwa, MUI, Hotel Syariah, Hukum Islam

ABSTRAK KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH Oleh: Lia Junita, NIM: 1516150007. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara, (2) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini mengggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan kualitatif yang bersifat perspektif dengan bentuk penelitian kepustakaan (library research), ) yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisa serta merumuskan bukubuku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, prakteknya masih banyak terjadi didaerah-daerah tidak mengikuti sesuai aturan dan kewenangannya yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meraka hanya mengeluarkan izin terus menerus tanpa melihat dari dampak yang mereka keluarkan izinnya. hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (2) Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah Namun di dalam prakteknya menunjukkan bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan tidak sesuai dengan qaidah ushuliyyah dan qaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mengikuti prinsip Kedudukan Manusia di Bumi , Prinsip Sebagai Kekuasaan sebagai Amanah, Prinsip Penegakan Keadilan, Prinsip Kepatuhan kepada Pemimpin, dan prinsip penegakan HAM. Kata kunci: Pertambangan Batubara

ABSTRAK Implementasi Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2016 Tentan Penyelengaraan Hiburan (Studi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan) Oleh: Pika Anggraini, NIM: 1611150062. Pembimbing I: Drs. H. Supardi,.M.Ag dan Pembimbing II: Etry Mike,.SH,.MH Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelengaraan Hiburan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat, (2)Bagamana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelengaraan Hiburan. Dalam penelitian ini peneliti menggunkan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian yurudis empiris (penelitian hukum sosiologis) atau penelitian hukum lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat Sumatera Selatan selama kurang lebih 2 bulan dari bulan Desember 2019 hingga Januari 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling dengan teknik analisi data menggunakan logika deduktif yaitu dengan cara peneliti memilih dengan sengaja Kecamatan Tanjung Sakti PUMU untuk dijadikan sampel penelitian dan di teliti mengenai: (1) bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelengaraan Hiburan. Setelah dilakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelengaraan Hiburan (Studi di Kecamatan Tanjung Sakti PUMU Kabupaten Lahat Sumatera Selatan) yang hasilnya mengenai waktu, izin keramain, Mengenai musik/hause musik, pakai penyanyi pelaksanaan aturan, hiburan menggunkan orgen tunggal pada malam hari tidak terlaksana dengan baik karena hany mengenai izin usaha pemilik orgen tunggal saja yang terlaksana. (2). Sedangkan ditinjau dari hukum Islam maka pengaturan mengenai pelaksanaan hiburan ini sudah sangat sesuai akan tetapi dalam hal pelaksanaannya maka acara yang menggunkan orgen tunggal pada malam hari di Kecamatan Tanjung Sakti PUMU lebih banyak mudharat dan sangat tidak sesuai dengan syariat Islam. Kata kunci: PERBUP, Hukum Islam, Penyelenggaraan Hiburan, Lahat

ABSTRAK Problematika Musaqah Di Desa Padang Capo Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Oleh: Siti Nur Fitroh, NIM: 1516120014, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah, Pembimbing I: Drs.H. Suansar Khatib, S.H, M.Ag dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.HI Ada dua persoalan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Problematika Akad Musaqah di Desa Padang Capo, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Akad Musaqah di Desa Padang Capo. Untuk mengungkap permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, maka peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh secara langsung dari para pihak melalui proses wawancara dan dokumentasi dan di lengkapi dengan data sekunder. Kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil musaqah yang dilakukan oleh masyarakat desa padang capo ini perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa ada saksi yang menghadirinya. Dalam pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil musaqah telah terdapat kebohongan yang dilakukan oleh pemilik lahan. Dimana pemilik lahan tidak memberi tahu keuntungan yang diperoleh dan tidak membagi hasil keuntungan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati diawal sehingga merugikan petani penggarap dan menguntungkan bagi pemilik lahan. dan juga tidak adanya penentuan masa kerja dalam melakukan praktek bagi hasil tersebut. Menurut hukum ekonomi syariah kerjasama ini sudah sesuai hanya saja ada beberapa hal yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Kata kunci: Musaqah, Hukum Ekonomi Syariah

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Karyawan dan Karyawati dengan PT KARYA RAFLESIA MANDIRI Ditinjau dari Hukum Islam dan Positif. Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu. 2. Dr. Imam Mahdi, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 3. Wery Gusmansyah, SH.I, M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 4. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat. 7 5. Etry Mike, M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan penuh semangat. 6. Bapak, Ibu Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ke depan

September 2020

ABSTRAK SISTEM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara) oleh: Mela, NIM: 1711150087. Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H dan Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H.M.H. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa di desa Sungai Lanang, (2) Bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menurut hukum islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adala untuk mengetahi sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang ada di desa Sungai Lanang dan mengetahi sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menurut hukum islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendakam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapanagn, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lampiran, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menghasilkan data penulis mendeskripsikan hasil wawancara kepada Pemerintah Desa Dan Unsur Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang ada di desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilaksanakan akan tentapi belum berjalan dengan baik karena sistem perencanaan yang masih kurang melibat kan masyarakat, kemudian pelasksanaan yang belum sesuai sengan apa yang telah direncanakan dan pengawasan yang tidak jelas berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. 2. Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menurut hukum Positif, berdasar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 di atur dalam Pasal 80, pasal 81 dan pasal 82, Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menurut hukum islam iyalah pembangunan yang meletakkan Allah sebagai pemilik mutlak atas segala sumber yang terdapat di alam semesta ini. Dan dalam perencanaan pembangunan lebih mengutamakan musyawarah serta memikirkan baik buruknya dari perencanaan tersebut, dalam usaha pelaksanaan pembangunan yang dilakukan itu diniat sebagai ibadah kepada Allah semata dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat serta mengawasi apa yang kita perbuat. Kata kunci: Sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, Pembangunan desa

Sep 2020

ABSTRAK Yuliani Pertiwi, NIM. 1611320011, 2020, “Bimbingan Karier Bagi Anak Tunagrahita (Studi Pada SMALB Kota Bengkulu)”. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana tahapan serta faktor pendukung dan faktor penghambat Bimbingan Karier Bagi Anak Tunagrahita SMALB Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan dan faktor pendukung serta faktor penghambat Bimbingan Karier bagi anak Tunagrahita (Studi Pada SMALB Kota Bengkulu). Informan penelitian ini berjumlah 14 orang, 5 orang guru pembimbing anak Tunagrahita, 4 orang anak Tunagrahita dan 3 orangtua anak Tunagrahita ringan dan 2 orang informan pendukung dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses tahapan Bimbingan Karier bagi anak Tunagrahita di SLBN 01 Kota Bengkulu adalah 1. Tahapan pemahaman diri 2. Tahapan mengidentifikasi kesesuaian minat dan bakat dengan potensi diri 3. Tahapan pemahaman lingkungan 4. Tahapan hambatan dan cara mengatasi hambatan 5. Tahapan merencanakan masa depan. Proses Bimbingan Karier dengan pendekatan individual yang diselenggarakan secara intruksional dan juga karyawisata kemudian metode yang digunakan dalam Bimbingan Karier yaitu secara demonstrasi dan metode drill. Faktor pendukung proses Bimbingan Karier di SLBN 01 Kota Bengkulu adalah menyesuaikan Bimbingan Karier dengan kebutuhan, kapasitas dan kemampuan anak Tunagrahita, fasilitas semua bidang keterampilan yang lengkap, menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dan memiliki sumber daya manusia yang sabar dan selalu memberikan motivasi dalam membimbing anak Tunagrahita. Faktor penghambat Bimbingan Karier bagi anak Tunagrahita adalah anak Tunagrahita yang memiliki IQ di bawah rata-rata, kurang konsentrasi dan disiplin diri anak Tunagrahita, hambatan komunikasi, serta kurangnya dukungan dari sebagian orang tua. Kata Kunci : Bimbingan Karier, Anak Tunagrahita.

ABSTRAK Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta Di Kota Bengkulu). Oleh: Fikri Yansyah, NIM: 1611150051. Pembimbing I: Rohmadi, S.Ag., MA dan Pembimbing II: Yovenska L. Man. M. HI Berdasarkan merumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 ayat 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu). 2) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 ayat 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu). 3) Untuk mengetahui bagaimana bentuk kepengurusan pembuatan akte kelahiran dari perkawinan siri. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah 1) Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 pasal 40 belum terlaksana karena masih banyak orang tua yang belum mengerti dan tidak mengetahui isi Perda sehingga tidak menyadari bahwa seharusnya sejak anak lahir sebelum 60 hari sudah melakukan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil. 2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang terjadi di Kota Bengkulu masih terdapat beberapa problematika yang terjadi. Problematika tersebut antara lain masih adanya orang tua anak yang beragama Islam yang melakukan pengesahan anak dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, adanya pengajuan ke Pengadilan Negeri tersebut adalah karena untuk mengisi kekosongan hukum manakala ada persoalan hukum yang belum diatur atau belum ada aturan hukumnya dan tidak terdapat pula aturan yang jelas yang menyebutkan dasar hukum penolakan harus diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. 3) Bentuk kepengurusan pembuatan akte kelahiran dari perkawinan siri, adapun Syarat dan Tata Membuat Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran; b. Nama dan Identitas saksi kelahiran. c. Kartu Tanda Penduduk Ibu; d. Kartu Keluarga Ibu; e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. Tata caranya, apabila pencatatan hendak dilakukan di tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratanpersyaratan di atas kepada Petugas Registrasi di kantor Kelurahan. Kata Kunci : Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Pasal 40, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Islam

ABSTRAK Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Oleh: Dita Karolina, Nim: 1316120058. Pembimbing I: Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Etry Mike, MH Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana bentukbentuk pelanggaran hak merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Pemalsuan Merek Kosmetik di Pasar Panorama Kota Bengkulu? Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini adala field research (penelitian lapangan). Yang bermanfaat untuk memberikan imformasi, fakta, data, dan mekanisme Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu). Jumlah keseluruhan informal adalah 7 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) bentuk pelengaran yang dilakukan oleh penjual kosmetik di pasar panorama sebegai berikut: pertama di sisi harga jelas berbeda yang asli dengan yang dijual di pasar panorama kota Bengkulu kedua dari bentuk juga mudah berubah dari pada yang asli, ketiga kualiatas sangat berbeda terutama dari ketahanan pada saat pemakaian, bagi yang melakukan pelanggaran atau menjiplak merek yang sudah terkenal dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang, karena merek merupakan suatu asset yang di lindungi (2) Sedangkan Dalam Islam juga dijelaskan bahwa pemalsuan merek itu merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah dan hukumnya haram. Penulis menyimpulkan bahwa dalam Islam hukuman yang bagi yang melakukan pelanggaran / penjiplakan dapat dikenakan hukuman potong tang karena bagi yang melakukan pemalsuan merek sama saja dengan mencuri dalam Islam dan hal itu sudah jelas di larang dan di haramkan dalam Islam. Dan Fatwa MUI juga memandang pemalsuan merek itu termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), juga melarang melakukan tindakan pemalsuan dan itu juga di haramkan. . Kata kunci: Pemalsuan merek Kosmetik

ABSTRAK Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas oleh: Susmita Sari, NIM 1611150011. Pembimbing 1: Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H, M.H Program Keluarga Harapan bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin, tetapi masih banyak masyarakat yang tergolong miskin dan layak menerima bantuan tersebut tidak terdata oleh pemerintah. Justru masih ada masyarakat yang tergolong mampu dibidang ekonomi namun terdata menjadi peserta penerima bantuan PKH,maka penetapan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) di KelurahanTerawas belum bisa dikatakan efektif atau belum tepat sasaran. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan spesifikasi penelitian Yuridis Sosiologis, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, penelitian ini bersifat Deskriptif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Bahwa Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas Secara menyeluruh belum berjalan dengan baik karena masih ada penerima bantuan PKH belum tepat sasaran. 2. Bahwa faktor yang menghambat dalam proses Penyaluran di Kelurahan Terawas yaitu Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Kriteria tingkat kemiskinan peraturan perundangundangan masiha bstrak, Pendataan yang tidak valid, dan kurangnya sarana dan prasarana yang sehingga pekerjaan pendamping tidak maksimal. Kata Kunci: TinjauanYuridis, Penyaluran, Program KeluargaHarapan,

ABSTRAK “Adat Basodo dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”. Oleh Vipin Anggraini, NIM : 1611110060. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, 1. Bagaimana praktek adat basodo dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek adat basodo dalam perkawinanan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk Menjelaskan Bagaimana Adat Basodo dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. (2) Menjelaskan bagaimana praktek Adat Basodo dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendeketan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1). Praktek pelaksanaan Adat Basodo dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dimulai dengan melibatkan tuan rumah yang sedekah, dan yang datang basodo. Adat ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dilaksanakannya adat ini adalah untuk menjalin dan memperkuat tali silaturahmi. Selain itu, juga dapat juga membantu yang sedekah dalam memuliakan undangan yang hadir dan menerapkan sifat tolong-menolong yang dianjurkan oleh Allah Swt. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat yang datang basodo adalah ketika mereka tidak memiliki biaya yang cukup, sementara ada yang akan melakukan hajat pernikahan. Adapun alasan masyarakat masih melaksanakan adat ini, karena sudah menjadi adat turun-temurun. Dan masyarakat juga memnggap tradisi ini memiliki banyak manfaatnya. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat basodo adalah pertama terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam adat basodo hukumya boleh karena tidak terdapat hal yang bertentangan dengan Islam. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan adat ini hukumnya sunah (dianjurkan), karena terdapat nilai tolong menolong, menjalin silaturahmi dan juga memuliakan undangan yang datang basodo. Akan tetapi, akan menjadi ‘urf fasid saat adat ini diwajibkan kepada seluruh masyarakat, ketika masyarakat merasa keberatan dan mengalami keterbatasan biaya untuk ikut melaksanakan adat ini. Hal ini bertentangan dengan syari‟at Islam, karena salah satu pihak yang terlibat dalam adat ini yakni masyarakat yang datang untuk basodo merasa terbebani dengan adanya adat ini, sehingga adat ini hukumnya makruh untuk dilaksanakan. Kata Kunci : Adat Basodo, Pesta Pernikahan , Hukum Islam

Julios Afran Gusthomy NIM. 1416121850

Dari hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitiandan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Asap Mungkus Tanpa Takaran di Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur**”.

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan asap mungkus tanpa takaran di Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur?
2. Praktik jual beli ikan asap mungkus tanpa takaran di kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

ABSTRAK Fuji Ayu Lestari NIM : 1611110045, Judul Skripsi “Perkawinan Pecoah Kohon dalam Suku Rejang Perspektif Urf” : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020. Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana pandangan masyarakat tentang Perkawinan Pecoah Kohon dalam Suku Rejang? (2). Bagaimana pandangan Urf terhadap Perkawinan Pecoah Kohon dalam Suku Rejang? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang Perkawinan Pecoah Kohon dalam Suku Rejang (2). Untuk mengetahui pandangan Urf terhadap Perkawinan Pecoah Kohon dalam Suku Rejang Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengungkap persoalan secara mendalam dan menyeluruh, peneltian menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian adat tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini telah mengungkapkan : Pertama, Menurut syarat dan macamnya perkawinan pecoah kohon termasuk „Urf shahih karena dapat menghindari perkawinan sepersusuan dan jika terjadi perpecahan atau perceraian di kemudian hari, tidak merusak hubungan keluarga besar. Kedua, namun menjadi „Urf fasid ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa perkawinan pecoah kohon dapat mendatangkan musibah bahkan menentukan keberlangsungan hidup keluarga yang menikah. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, karena mengandung kepercayaan pada kekuatan selain Allah Swt yang dapat menentukan kehidupan manusia. Kata Kunci: Pecoah Kohon, Urf

ABSTRAK PENGELOLAAN DANA DESA, DESA PASAR LAMA KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO 6 TAHUN 2014 DAN PRESFEKTIP PIQIH SIYASAH oleh: Soni Rahmadi, NIM: 1711150091. Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Apakah pengelolaan dana desa Pasar Lama sudah sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014, (2) Bagaimana pengelolaan dana desa Pasar Lama menurut perspektip fiqih siyasah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa Pasar Lama sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 dan Untuk menjelaskan pengelolaan dana desa menurut fiqih siyasah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendakam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapanagn, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lampiran, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menghasilkan data penulis mendeskripsikan hasil wawancara kepada Pemerintah Desa Dan Unsur Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Pasar Lama Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sudah berjalan sesuali dengan Undang-Undan No6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun belum berjalan dengan baik selain memeng rata-rata hanya tamat SMA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasar Lama menurut perspektip Fiqh Siyasah iyalah ada empat landasan fiqih siyasah yang mendasari pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu : Tauhid, Rububiyyah, Khilafah dan Tazkiyah. Kata kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Presfektip fiqih Siyasah

ABSTRAK Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara).Oleh Wika Andriani, NIM 1316120099. Pembimbing I: Rohmadi, S.Ag.,MA dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Ambang Batas Keuntugan Dalam Perdagangan bahan Kebutuhan Pokok (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). 2) Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ambang Batas Keuntugan Dalam Perdagangan bahan Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). Jenis dan pendekatan penelitian adalah Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi berupa buku-buku dan semua yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan penelitian tentang Ambang Batas Keuntugan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan 1) Ambang Batas Keuntugan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang raya Kabupaten Bengkulu Utara). Tidak ada batasan keuntungan (menurut syari’at). Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui Jika pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka tidaklah masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran. Di Desa Alas Bangun penjual mengambil harga yang tinggi dan hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan susahnya masyarakat untuk membeli bahan yang sangat dibutuhkan. 2) Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ambang Batas Keuntugan Dalam Perdagangan bahan Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara),Islam memperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang banyak dengan syarat barang tersebut bukan bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang, karena jika mencari keuntungan yang sangat besar dari barang pokok akan menyebabkan harga kebutuhan pokok tersebut menjadi tinggi, dan banyak orang kesulitan untuk mendapatkannya dan terdzalimi dari pengambilan keuntungan besar tersebut. Mengambil keuntungan memang tidak ditentukan berapa batasan maksimal mengambil keuntungan, namun keuntungan tersebut tidak disebabkan karena usaha penimbunan (ihtikar), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal dan dapat mendzalimi banyak orang. Kata Kunci : Ambang Batas Keuntungan, Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok

ABSTRAK Dini Indah Lestari, NIM. 1611120023, Judul: “Tinajuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur)”. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur. 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran Menurut Hukum Islam tersebut. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan Metode Obsevasi, Interview, Dokumentasi dan Studi Pustaka. Setelah data terkumpul kemudian penulis melakukan Analisis Data dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli tersebut penjual melakukan akad jual beli dengan mencampurkan dengan minyak goreng dan air putih dan juga mengurangi timbangan atau ukuran kurang dari 1 liter. Padahal dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dengan syariat islam dikarenakan ada unsur Gharar yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli. Kata kunci: Jual Beli dan Hukum Islam

LANJUTAN DARI YUSRIZAL

ABSTRAK Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Oleh: Dita Karolina, Nim: 1316120058. Pembimbing I: Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Etry Mike, MH Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana bentukbentuk pelanggaran hak merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Pemalsuan Merek Kosmetik di Pasar Panorama Kota Bengkulu? Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini adala field research (penelitian lapangan). Yang bermanfaat untuk memberikan imformasi, fakta, data, dan mekanisme Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu). Jumlah keseluruhan informal adalah 7 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) bentuk pelengaran yang dilakukan oleh penjual kosmetik di pasar panorama sebegai berikut: pertama di sisi harga jelas berbeda yang asli dengan yang dijual di pasar panorama kota Bengkulu kedua dari bentuk juga mudah berubah dari pada yang asli, ketiga kualiatas sangat berbeda terutama dari ketahanan pada saat pemakaian, bagi yang melakukan pelanggaran atau menjiplak merek yang sudah terkenal dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang, karena merek merupakan suatu asset yang di lindungi (2) Sedangkan Dalam Islam juga dijelaskan bahwa pemalsuan merek itu merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah dan hukumnya haram. Penulis menyimpulkan bahwa dalam Islam hukuman yang bagi yang melakukan pelanggaran / penjiplakan dapat dikenakan hukuman potong tang karena bagi yang melakukan pemalsuan merek sama saja dengan mencuri dalam Islam dan hal itu sudah jelas di larang dan di haramkan dalam Islam. Dan Fatwa MUI juga memandang pemalsuan merek itu termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), juga melarang melakukan tindakan pemalsuan dan itu juga di haramkan. . Kata kunci: Pemalsuan merek Kosmetik

Julios Afran Gusthomy NIM. 1416121850

Dari hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitiandan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Asap Mungkus Tanpa Takaran di Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur”. B. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan asap mungkus tanpa takaran di Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur? 2. Praktik jual beli ikan asap mungkus tanpa takaran di kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Mengetahui pelaksanaan praktik jual beli ikan asap mungkus tanpa takaran di Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur. 18 2. Mengetahui serta memahami praktik jual beli ikan asap mungkus tanpa takaran di Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRAK Sistem Promo Dalam Praktik Jual Beli Di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Oleh: Lala Veronica, NIM: 1611120035. Pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Sistem Promo dalam Praktik Jual Beli Di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah, (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sistem Promo dalam Praktik Jual Beli Di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Promo dalam Praktik Jual Beli Di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah bentuk deskriptif kualitatif, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif. Dalam metode ini peneliti memberikan gambaran yang riil tentang jual beli dengan sistem promo di Indomaret. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Dalam Sistem Promo dalam Praktik jual beli Di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu dengan sistem promosi yang dilakaukan oleh pihak Indomaret yaitu, dengan cara sistem menempel harga promo, dan promosi dengan harga normal. Faktor dan solusi perubahan harga promo disebakan oleh kelalaian karyawan, gangguan jaringan internet toko, dan solusi yang diberikan memberikan harga termurah pada barang, mengembalikan sejumlah uang yang dibayar terhadap barang jika konsumen membatalkan akad jual beli. Tujuan promosi yaitu, memberi informasi, membujuk pelangan untuk melakukan pembelian, meningkatkan penjualan, dan menghabiskan stok barang lama. (2) Perspektif hukum Islam terhadap Sistem Promo dalam Praktik Jual Beli Di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah adalah boleh karena sudah sesuai dengan rukun dan sarat jual beli. Dan dasar hukum jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi. Sedangkan dalam perspektif hukum positif terhadap Sistem Promo dalam Praktik Jual Beli Di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah adalah boleh selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan sesuai dengan aturan hukum positif. Kata Kunci: Promosi, Jual Beli, Perspektif, Hukum Islam, Hukum Positif, Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah.

ABSTRAK Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara).Oleh Wika Andriani, NIM 1316120099. Pembimbing I: Rohmadi, S.Ag.,MA dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Ambang Batas Keuntugan Dalam Perdagangan bahan Kebutuhan Pokok (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). 2) Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ambang Batas Keuntugan Dalam Perdagangan bahan Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). Jenis dan pendekatan penelitian adalah Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi berupa buku-buku dan semua yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan penelitian tentang Ambang Batas Keuntugan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan 1) Ambang Batas Keuntugan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang raya Kabupaten Bengkulu Utara). Tidak ada batasan keuntungan (menurut syari’at). Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui Jika pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka tidaklah masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran. Di Desa Alas Bangun penjual mengambil harga yang tinggi dan hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan susahnya masyarakat untuk membeli bahan yang sangat dibutuhkan. 2) Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ambang Batas Keuntugan Dalam Perdagangan bahan Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara),Islam memperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang banyak dengan syarat barang tersebut bukan bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang, karena jika mencari keuntungan yang sangat besar dari barang pokok akan menyebabkan harga kebutuhan pokok tersebut menjadi tinggi, dan banyak orang kesulitan untuk mendapatkannya dan terdzalimi dari pengambilan keuntungan besar tersebut. Mengambil keuntungan memang tidak ditentukan berapa batasan maksimal mengambil keuntungan, namun keuntungan tersebut tidak disebabkan karena usaha penimbunan (ihtikar), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal dan dapat mendzalimi banyak orang. Kata Kunci : Ambang Batas Keuntungan, Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok

ABSTRAK Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota Bengkulu) Oleh Anggi Herta Ningrum, NIM 1416111774, Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana penanaman aqidah kepada anak bagi keluarga beda agama (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penanaman aqidah kepada anak bagi keluarga beda agama. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanaman aqidah kepada anak yang keluarga beda agama . Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat dalam memberikan informasi, kebenaran kemudian data yang diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab persoalan permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penanaman aqidah kepada anak bagi keluarga beda agama masih sangat disayangkan di kalangan masyarakat dikarenakan ada sebagian orang yang tidak perduli terhadap aqidah anak-anaknya, dan seharusnya orang tua lah pemeran utama dalam membantu pendidikan aqidah kepada anak , dan harusnya pendidikan aqidah ditanamkan sejak anak masih berusia dini dan lebih bagusnya lagi sejak didalam kandungan. Kata Kunci :Hadanah, Hukum islam

ABSTRAK Areka Murasti, NIM. 1416622031, 2019. Alasan Calon Pengantin tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Kantor Urusan AgamaKecamatan Kerkap Ditinjau dari Hukum Islam. Pembimbing I Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II Fauzan, M.Ag.,MA Kata Kunci: Dispensasi, Pernikahan, di Bawah Umur Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyak terjadi perkawinan dibawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan perkawinan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Faktor apa sajakah bagi pasangan calon pengantin tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Faktor apa sajakah bagi pasangan calon pengantin tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi nikah ini disebabkan oleh beberapa faktor. a) faktor ekonomi, b) hamil luar nikah, c) tertangkap zina (terkena hukum adat cuci kampung). 2) Dispensasi Nikah Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara menurut Hukum Islam pada dasarnya adalah mubah (sah), namun hukumnya bisa menjadi makruh karena faktor ekonomi, bisa menjadi wajib karena faktor tertangkap zina, serta bisa menjadi haram karena faktor hamil di luar nikah jika laki-laki yang menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya.

ABSTRAK Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam(Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan) Oleh Arif Nofal NIM 1416111795 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah melakukan penelitian mengenai perilaku penundaan pernikahan ditinjau dari hukum Islam di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang melatar belakangi adalah belum mendapatkan pasangan yang cocok, agar Tetap Bebas, alasan karir, alasan keuangandan pernah gagal untuk mendapatkan pasangan. Tinjauan hukum Islam tentang perilaku penundaan pernikahan yang dilakukan oleh informan menurut Imam Syafi‟I dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda menikah dengan alasan karir adalah sunnah. Menurut Imam Syafi‟I dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena ingin bebas hukumnya makruh. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum siap dalam hal materi/rezeki maka hukumnya sunnah. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum bertemu jodoh yang pas maka hukum nya makruh. Kata kunci :Perilaku, Penundaaan, Pernikahan

ABSTRAK Nama: Arman Suhadi, NIM: 1516110012, Judul Skripsi: “ Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Dari Perspektif Hukum Islam”. Dalam hal ini persoalan yang akan di bahas pada skripsi, yaitu: (1). Bagaimana pelaksanaan adat badarak dalam pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam perspektif hukum Islam, (2). Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai adat badarak dalam pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan adat badarak dalam pernikahan dan menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai adat badarak dalam pernikahan yang terjadi di Kecamatan Ipuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Terlebih dahulu akan menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah ketua adat, kepala kaum, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) pelaksanaan adat badarak di Kecamatan Ipuh mempunyai kesamaan di tiap desa yang menjadi titik perbedaan hanya terletak pada acara adat, waktu serta tempat pelaksanaannya. (2) mengenai pemberian sanksi adat badarak di Kecamatan Ipuh itu dilatar belakangi oleh kesepakatan orang-orang adat, pegawai syarak dan para tetua desa lainnya yang ada di masyarakat tersebut. Ketentuan denda tidak dilaksanakannya adat badarak di Kecamatan Ipuh itu berkisar antara Rp. 1.000.000, - 5.000.000. (3) adapun pelaksanaan adat badarak dalam pernikahan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena proses terjadinya adat badarak tersebut berbarengan dengan hari pernikahan. Adapun mengenai proses badarak yang diiringi dengan nyanyian dan tabuhan rebana serta tarian, hal tersebut dibolehkan karena termasuk kedalam memeriahkan walimah dan tidak mengandung unsur kemungkaran. Kata kunci: adat badarak, pernikahan, walimatul „urs, hukum islam („urf)

ABSTRAK Analisis Putusan Hakim Agama Dalam Menetapkan Putusan Perkara Nusyuz Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA TentangNusyuz), olehBudimanSepriWeli, NIM 151611005. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim Agama dalam menetapkan putusan perkara nusyuzt ahun 2018dan bagaimana analisis terhadap putusan hakim Agama pada perkara nusyuzdi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih jauh yang dimaksudanalisis terhadap putusan hakim Agama pada perkara nusyuz di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kpustakaan (library research). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yakni Metode Dokumen (Dokumentation). Dalam menganalisa data pada skripsi ini, penyusun menggunakan metode deduksi yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.Dari hasilpenelitianditemukanbahwa (1) Pada perkara cerai talak dapat dilihat bahwa hakim menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat membantah perintah Penggugat Tergugat berbicara kasar terhadap Penggugat, itu termasuk kategori nusyuz.Perkara cerai talak yang ditetapkan oleh hakim itu sudah sesuai. Tetapi pada putusan perkara nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn itu belum sesuai karena di dalam hukum Islam perbuatan-perbuatan meninggalkan suami, berbicara kasar atau membentak suami dan membantah suami itu termasuk kategori nusyuz.Pada perkara ceraigugat dapat di lihat bahwa hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbanganTermohon memukul Pemohon atau KDRT, Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon menelantarkan atau tidak memberi nafkah, Termohon mengusir Pemohon. (2)Kasus cerai talak itu sudah sesuai dengan hukum Islam karena hak-hak isteri setelah cerai (pada masa iddah) yang mana hak isteri berupa nafkah, kiswah dan mut‟ah sudah terpenuhi. Tetapi pada putusan perkara nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Bn itu belum sesuai karena di dalam hukum Islam perbuatan-perbuatan meninggalkan suami, berbicara kasar atau membentak suami dan membantah suami itu termasuk kategori nusyuz.Sedangkan kasus cerai gugat itu tidak terlihat hak-hk isteri dalam masa iddah, justru isteri yang dibebani biaya perkara dan isteri tidak mendapatkan hak-haknya setelah cerai (pada masa iddah). Sementara dalam hukum Islam suami yang melakukan nusyuz, yaitu melakukan KDRT, meninggalkan rumah, menelantarkan isteri, dan tidak memberi nafkah itu seharusnya hakim menetapkan hak-hak isteri tersebut sama dengan menetapkan hak isteri pada cerai talak. Kata Kunci: Putusan Hakim Agama Dalam Menentukan Putusan Perkara Nusyuz Tahun 2018.

ABSTRAK Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara) Oleh: Diah Putri Utami, NIM: 1516110022. Pembimbing II: Drs. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MH.I Ada satu persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah. Apa saja upaya pasangan yang hamil di luar nikah untuk mencapai keutuhan rumah tangganya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara). Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan dan data dikumpulkan melalui kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data ini menggunakan (dokumentasi dan wawancara). Sedangkan untuk responden peneliti ini adalah Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah, Kepala Desa Padang Sepan, Imam Masjid Desa Padang Sepan. Dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu: Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah adalah pertama berkomitmen yang kuat, kedua saling menghargai, ketiga saling percaya, keempat berkomunikasi dan membudayakan keterbukaan kelima memenuhi nafkah, keenam saling mencintai dan menyayangi. Bahwasannya pasangan yang hamil di luar nikah di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik tetap mampu menjaga keutuhan di dalam rumah tangganya dengan upaya-upaya yang mereka lakukan. Seperti salah satu kunci kebahagian yang hampir semua subjek berdominan dengan berkomunikasi dan membudayakan keterbukaan. Supaya bisa melalui semua permasalahan yang sedang dihadapi dan pasangan suami istri sama-sama berusaha belajar mencari solusi setiap ada konflik, yang mana berupaya agar tetap tentram dan utuh dalam rumah tangganya. Kata Kunci: Upaya, Keutuhan Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah,

ABSTRAK Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin-Cerai Di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang oleh Erin Pionita Sari NIM 1516110007 Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsiini, yaitu: (1) Bagaimana praktek terjadinya kawin-cerai yang terjadi di Desa Sosokan Taba kecamatan Muara Kemumu kabupaten Kepahiang, (2) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek terjadinya cerai berkali-kali dan mengidenfitikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin-cerai kali di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu.Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research).Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta melakukan wawancara kepada responden yaitu pihak KUA, KepalaDesa, masyarakat dan pelakukawin-cerai.untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis.Analisis deskriprif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Dari penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktek cerai dari hasil wawancara dengan 4 orang pelaku kawin-cerai, terjadi 25 perceraian, 23 kali cerai secara gugat dan 2 kali secara talak. Dari 25 tersebut 8 kali proses perceraiannya secara resmi dan 17 kali proses percerainnya tidak resmi, lama masa terlama selama 11 tahun tersingkat 20 hari dan selang waktu menjanda atau menduda paling lama 5 tahuntersingkat 1 tahun(2) Dari setiap kali melakukan kawin-cerai dengan pasangan yang berbeda terdapat faktor-faktor penyebab perceraian yaitu factor ekonomi,factor tidak bertanggungjawab, factor penganiayaan, factor gangguan pihak ketiga, factor tidak ada keharmonisan, factor kelainan seksual, dan factor tidak mempunyai keturunan. Kata kunci: Faktor-Faktor, kawin-cerai

ABSTRAK Fuji Ayu Lestari NIM : 1611110045, Judul Skripsi “Perkawinan Pecoah Kohon dalam Suku Rejang Perspektif Urf” : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020. Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana pandangan masyarakat tentang Perkawinan Pecoah Kohon dalam Suku Rejang? (2). Bagaimana pandangan Urf terhadap Perkawinan Pecoah Kohon dalam Suku Rejang? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang Perkawinan Pecoah Kohon dalam Suku Rejang (2). Untuk mengetahui pandangan Urf terhadap Perkawinan Pecoah Kohon dalam Suku Rejang Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengungkap persoalan secara mendalam dan menyeluruh, peneltian menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian adat tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini telah mengungkapkan : Pertama, Menurut syarat dan macamnya perkawinan pecoah kohon termasuk „Urf shahih karena dapat menghindari perkawinan sepersusuan dan jika terjadi perpecahan atau perceraian di kemudian hari, tidak merusak hubungan keluarga besar. Kedua, namun menjadi „Urf fasid ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa perkawinan pecoah kohon dapat mendatangkan musibah bahkan menentukan keberlangsungan hidup keluarga yang menikah. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, karena mengandung kepercayaan pada kekuatan selain Allah Swt yang dapat menentukan kehidupan manusia. Kata Kunci: Pecoah Kohon, Urf

ABSTRAK Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Perspektif Hukum Islam. Oleh Istianatul Fitriyah NIM.1416111802 Ada 2 persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Aparatur Sipil Negara dan Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Aparatur Sipil Negara di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan keluarga pada Aparatur Sipil Negara dan perspektif Hukum Islam terhadap pengelolaan keuangan keluarga pada Aparatur Sipil Negara di IAIN Bengkulu.Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan penulis dilapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul lalu diuraikan kemudian disimpulkan dengan metode/ cara berpikir induktif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pengelolaan keuangan keluarga sudah stabil dan dalam perspektif hukum Islam sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam hukum Islam. Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan, Keluarga

ABSTRAK “Memperbaiki Penampilan Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam”,Oleh Mahmudah, NIM 1516110037. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa yang menjadi syarat-syarat, langkah-langkah dan ciri-ciri dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam, (2) Bagaimanabentuk-bentuk memperbaiki penampilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahuiapa yang menjadi syarat-syarat, langkah-langkah dan ciri-ciri dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk memperbaiki penampilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Metodepenelitianinididasarkanpadapenelitiankepustakaan(Library research)Jenis data yang dipergunakandalampenelitianiniadalahkualitatifdenganpendekatannormatifyaknip endekatanhukumdoktrinerataustudidokumen.Darihasilpenelitianiniditemukanbah wadalam memperbaiki penampilan menurut hukum Islam demi menjaga keutuhan rumah tangga tidak di haramkan asal tidak menambah dan mengurangi struktur komponen yang sampai merubah ciptaan Allah. Kata Kunci: Penampilan, Keutuhan Rumah Tangga ,Hukum Islam

ABSTRAK Pranata dian sari, NIM: 1416111760, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran ( Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)” Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan yang memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga terpaksa menunda perkawinan akibat tingginya jumlah uang hantaran yang telah ditetapkan dari pihak perempuan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi uang hantaran di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data kualitatif. Data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatansemuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah yang telah ditetapkan di kampung tersebut. Melihat kepada kaidah-kaidah fiqhiyyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat „urf yang sahih bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan. Kata Kunci: Hukum Islam, Uang Hantaran

ABSTRAK Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn) Oleh: SILTAH, NIM: 1516110035. Pembimbing I: Dr. John Kenedi, S.H., M.Hum dan Pembimbing II: Yovenska, L., Man, MH.I Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn. Adapun tujuan penelitan ini untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn. Jenis penelitan ini adalah penelitan lapangan (field research) dengan pendekatan diskriptif kualitataif yakni data yang dikumpulkan bentuk kata-kata ,dan gambar, dan alasan memilih pendekatan deskriptif kualitatif dikarakan kebanyakan data yang diambil bukan berbentuk angka data yang dimaksud meliputi wawancara terhadap informan, catatan lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi.Kemudian data tersebut diuraikan dan di analisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitan ini ditemukan bahwa (1) Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn adalah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, seorang yang terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. dan Pasal 40 huruf a KHI, dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu. (a) karena wanita yang bersangkutan masih terkai suatu perkawinan dengan pria lain. Pertimbangan hakim, Menimbang bahwa dari keterangan pemohon I dan Pemohon II serta bukti tertulis P, ditemukan fakta bahwa perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya adalah pada tanggal 16 Juli 2016, ini berarti ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012, Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari seorang laki-laki (2)Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PAp.Bn kurang tepat, karena menimbang dari sisi kemaslahatan dan menolak kemapsadatan bagi umat dan mengantarkan pada tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan. Kata kunci : Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri

ABSTRAK “Adat Basodo dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”. Oleh Vipin Anggraini, NIM : 1611110060. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, 1. Bagaimana praktek adat basodo dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek adat basodo dalam perkawinanan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk Menjelaskan Bagaimana Adat Basodo dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. (2) Menjelaskan bagaimana praktek Adat Basodo dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendeketan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1). Praktek pelaksanaan Adat Basodo dalam Pesta Pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dimulai dengan melibatkan tuan rumah yang sedekah, dan yang datang basodo. Adat ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dilaksanakannya adat ini adalah untuk menjalin dan memperkuat tali silaturahmi. Selain itu, juga dapat juga membantu yang sedekah dalam memuliakan undangan yang hadir dan menerapkan sifat tolong-menolong yang dianjurkan oleh Allah Swt. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat yang datang basodo adalah ketika mereka tidak memiliki biaya yang cukup, sementara ada yang akan melakukan hajat pernikahan. Adapun alasan masyarakat masih melaksanakan adat ini, karena sudah menjadi adat turun-temurun. Dan masyarakat juga memnggap tradisi ini memiliki banyak manfaatnya. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat basodo adalah pertama terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam adat basodo hukumya boleh karena tidak terdapat hal yang bertentangan dengan Islam. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan adat ini hukumnya sunah (dianjurkan), karena terdapat nilai tolong menolong, menjalin silaturahmi dan juga memuliakan undangan yang datang basodo. Akan tetapi, akan menjadi ‘urf fasid saat adat ini diwajibkan kepada seluruh masyarakat, ketika masyarakat merasa keberatan dan mengalami keterbatasan biaya untuk ikut melaksanakan adat ini. Hal ini bertentangan dengan syari‟at Islam, karena salah satu pihak yang terlibat dalam adat ini yakni masyarakat yang datang untuk basodo merasa terbebani dengan adanya adat ini, sehingga adat ini hukumnya makruh untuk dilaksanakan. Kata Kunci : Adat Basodo, Pesta Pernikahan , Hukum Islam

ABSTRAK Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta Di Kota Bengkulu). Oleh: Fikri Yansyah, NIM: 1611150051. Pembimbing I: Rohmadi, S.Ag., MA dan Pembimbing II: Yovenska L. Man. M. HI Berdasarkan merumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 ayat 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu). 2) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 ayat 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu). 3) Untuk mengetahui bagaimana bentuk kepengurusan pembuatan akte kelahiran dari perkawinan siri. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah 1) Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 pasal 40 belum terlaksana karena masih banyak orang tua yang belum mengerti dan tidak mengetahui isi Perda sehingga tidak menyadari bahwa seharusnya sejak anak lahir sebelum 60 hari sudah melakukan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil. 2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang terjadi di Kota Bengkulu masih terdapat beberapa problematika yang terjadi. Problematika tersebut antara lain masih adanya orang tua anak yang beragama Islam yang melakukan pengesahan anak dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, adanya pengajuan ke Pengadilan Negeri tersebut adalah karena untuk mengisi kekosongan hukum manakala ada persoalan hukum yang belum diatur atau belum ada aturan hukumnya dan tidak terdapat pula aturan yang jelas yang menyebutkan dasar hukum penolakan harus diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. 3) Bentuk kepengurusan pembuatan akte kelahiran dari perkawinan siri, adapun Syarat dan Tata Membuat Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran; b. Nama dan Identitas saksi kelahiran. c. Kartu Tanda Penduduk Ibu; d. Kartu Keluarga Ibu; e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. Tata caranya, apabila pencatatan hendak dilakukan di tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratanpersyaratan di atas kepada Petugas Registrasi di kantor Kelurahan. Kata Kunci : Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Pasal 40, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Islam

ABSTRAK SISTEM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara) oleh: Mela, NIM: 1711150087. Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H dan Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H.M.H. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa di desa Sungai Lanang, (2) Bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menurut hukum islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adala untuk mengetahi sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang ada di desa Sungai Lanang dan mengetahi sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menurut hukum islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendakam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapanagn, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lampiran, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menghasilkan data penulis mendeskripsikan hasil wawancara kepada Pemerintah Desa Dan Unsur Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang ada di desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilaksanakan akan tentapi belum berjalan dengan baik karena sistem perencanaan yang masih kurang melibat kan masyarakat, kemudian pelasksanaan yang belum sesuai sengan apa yang telah direncanakan dan pengawasan yang tidak jelas berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. 2. Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menurut hukum Positif, berdasar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 di atur dalam Pasal 80, pasal 81 dan pasal 82, Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menurut hukum islam iyalah pembangunan yang meletakkan Allah sebagai pemilik mutlak atas segala sumber yang terdapat di alam semesta ini. Dan dalam perencanaan pembangunan lebih mengutamakan musyawarah serta memikirkan baik buruknya dari perencanaan tersebut, dalam usaha pelaksanaan pembangunan yang dilakukan itu diniat sebagai ibadah kepada Allah semata dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat serta mengawasi apa yang kita perbuat. Kata kunci: Sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, Pembangunan desa

ABSTRAK PENGELOLAAN DANA DESA, DESA PASAR LAMA KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO 6 TAHUN 2014 DAN PRESFEKTIP PIQIH SIYASAH oleh: Soni Rahmadi, NIM: 1711150091. Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Apakah pengelolaan dana desa Pasar Lama sudah sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014, (2) Bagaimana pengelolaan dana desa Pasar Lama menurut perspektip fiqih siyasah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa Pasar Lama sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 dan Untuk menjelaskan pengelolaan dana desa menurut fiqih siyasah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendakam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapanagn, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lampiran, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menghasilkan data penulis mendeskripsikan hasil wawancara kepada Pemerintah Desa Dan Unsur Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Pasar Lama Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sudah berjalan sesuali dengan Undang-Undan No6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun belum berjalan dengan baik selain memeng rata-rata hanya tamat SMA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasar Lama menurut perspektip Fiqh Siyasah iyalah ada empat landasan fiqih siyasah yang mendasari pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu : Tauhid, Rububiyyah, Khilafah dan Tazkiyah. Kata kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Presfektip fiqih Siyasah

ABSTRAK Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas oleh: Susmita Sari, NIM 1611150011. Pembimbing 1: Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H, M.H Program Keluarga Harapan bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin, tetapi masih banyak masyarakat yang tergolong miskin dan layak menerima bantuan tersebut tidak terdata oleh pemerintah. Justru masih ada masyarakat yang tergolong mampu dibidang ekonomi namun terdata menjadi peserta penerima bantuan PKH,maka penetapan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) di KelurahanTerawas belum bisa dikatakan efektif atau belum tepat sasaran. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan spesifikasi penelitian Yuridis Sosiologis, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, penelitian ini bersifat Deskriptif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Bahwa Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas Secara menyeluruh belum berjalan dengan baik karena masih ada penerima bantuan PKH belum tepat sasaran. 2. Bahwa faktor yang menghambat dalam proses Penyaluran di Kelurahan Terawas yaitu Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Kriteria tingkat kemiskinan peraturan perundangundangan masiha bstrak, Pendataan yang tidak valid, dan kurangnya sarana dan prasarana yang sehingga pekerjaan pendamping tidak maksimal. Kata Kunci: TinjauanYuridis, Penyaluran, Program KeluargaHarapan,